

**TINGKATPARTISIPASI MASYARAKATTERHADAP PROGRAM
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI
DI KELURAHAN BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Sosial Dalam Bidang Pengembangan Masyarakat Islam



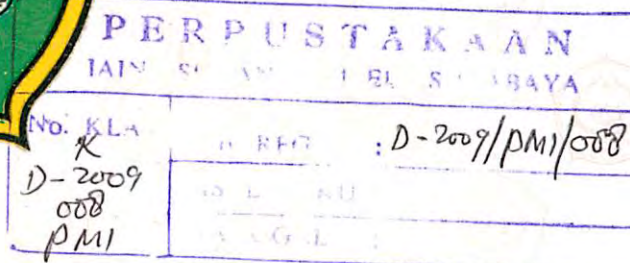
Oleh :

ACHMAD AMINUR ROCHMAN

NIM : BO2205004



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS DAKWAH
JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
2009**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Aminur Rochman (BO2205004) ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 21 Juli 2009

Pembimbing



Drs. H. Hasan Bisri WD, M.Ag

NIP : 195203091 982031003

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh Achmad Aminur Rochman telah dipertahankan di depan

Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 04 Agustus 2009

Mengesahkan,

Fakultas Dakwah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,

Prof. Dr. Shonhadji Dip. Is
NIP. 1949072819671211001

Ketua,

Drs. H. Hasan Bisri WD, M.Ag
NIP : 195203091 982031003

Sekretaris,

Drs. Syaiful Ahrori M, EI
NIP. 195509251991031001

Penguji I,

Drs. Nadhir Salahuddin, MA
NIP. 197107081994031001

Penguji II,

Dra. Pudji Rahmawati, M. Kes
NIP. 196703251994032002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
 BAB II : LANDASAN TEORI	 13
A. Pembahasan Teori	13
1. Partisipasi Masyarakat	13
a. Pengertian Partisipasi Masyarakat	13
b. Pengelompokan Partisipasi Masyarakat	16
c. Tingkatan Partisipasi Masyarakat.....	17
d. Bentuk Partisipasi Masyarakat	18
e. Mendorong dan Menggerakkan Partisipasi	20
f. Motif Partisipasi Masyarakat	24
g. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat	27
h. Keberhasilan Partisipasi Masyarakat	31

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Sebagai mahluk social (*zoon politicon*) manusia senantiasa diharapkan saling berhubungan baik terhadap sesamanya, memiliki rasa kebersamaan, hidup tolong menolong, saling bekerjasama, serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Dalam al qur'an dijelaskan surat Al-Mulk ayat 3 yakni;



Artinya: “Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang”¹

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV Toha Putra, 1989), hal. 955

Begitu pula halnya dalam melaksanakan tugas kehidupan dan pembangunan bangsanya manusia dituntut untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Pernyataan ini mengisyaratkan untuk mencapai keberhasilan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan unsur yang tak dapat dipisahkan dalam proses pembangunan itu sendiri.²

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan,

2

Sebagai langkah konkret paradigma pembangunan tersebut, pemerintah mencanangkan sebuah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri. Berjalannya PNPM Mandiri harus ada partisipasi masyarakat yang harus diutamakan. Program pemerintah tidak hanya mengandalkan dana yang begitu besar jumlahnya tanpa ada dukungan dari masyarakat.

Program mandiri diluncurkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 30 April 2007 di Kota Palu Sulawesi Tengah, sesungguhnya merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui konsolidasi program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di berbagai lembaga.³ Mengingat beragamnya tata cara dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri yang ada di berbagai sektor.

³ Tim Pengendali PNPM Mandiri Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri* (Jakarta: Direktorat Jendral Cipta Karya, 2008), hal. 4

Program PNPM Mandiri secara umum bertujuan meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat secara mandiri. Sedangkan tujuan khususnya diantaranya meningkatnya partisipasi seluruh masyarakatnya, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengabilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, serta akuntabel. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*).

5

Penyelenggara program PNPM Mandiri dilakukan secara berjenjang dari tingkat nasional sampai tingkat kelurahan/desa. Ketua pelaksana di tingkat pusat Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Wakil ketua Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM, Kementerian Negara PPN/Bappenas.⁶ Di tingkat provinsi melalui Bappeda Provinsi, di tingkat Kota/ Kabupaten melalui Bappeda Kota/Kabupaten. Di tingkat kelurahan di bawah rekomendasi camat dan sebagai pelaksananya di tingkat kelurahan adalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). Di samping itu di kelurahan yang menjalani program PNPM Mandiri juga sudah terbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adalah nama untuk kelompok warga masyarakat pemanfaat dana Bantuan Langsung Tunai (BLM) PNPM Mandiri.

⁵ Tim Pengendali PNPM Mandiri Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, hal. 11

[illegible]

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri benar-benar dari masyarakat atau hanya sebatas menyelesaikan program proyek pemerintah saja. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek akan gagal. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya. Dalam pelaksanaan program terdapat prinsip transparansi dan partisipatif, artinya semua proses kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian harus dilaksanakan secara terbuka dan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Indikator pelibatan masyarakat adalah peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hal-hal seperti keuangan dan manajemen program, keinginan masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan keputusan, serta peningkatan kemampuan dari masyarakat yang berpartisipasi dalam mengubah keputusan menjadi aksi.

7

B. Rumusan Masalah

- ### C. Tujuan Penelitian

- #### D. Manfaat Penelitian

- [illegible]

4. PNPM Mandiri ialah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.¹¹

5. Kelurahan Bugul Kidul merupakan sebuah lembaga pelayanan pemerintah untuk masyarakat yang terletak Jl Patimura No. 5 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.

¹¹ Tim Pengendali PNPM Mandiri Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, hal. 11

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembahasan ini berikut akan dijelaskan sistematika pembahasan yang terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan berisi tentang latar belakang berdirinya PNPM Mandiri, dasar hukum, tujuan serta pelaksanaannya. Rumusan masalah dalam perumusannya terdapat dua masalah yang diangkat. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian menjelaskan tentang manfaat akademik dan manfaat praktisnya. Untuk definisi konsep mendefinisikan tiap item agar maksud judul lebih terarah dalam fokus kajiannya, dan sistematika pembahasan menjelaskan gambaran dari masing-masing bab yang terdiri dari sub bab kajian supaya dapat mengetahui isi bab sebelum melangkah ke bab berikutnya lebih mendalam.

BAB II : Landasan teori menjelaskan mengenai partisipasi masyarakat yang terdiri dari pengertian partisipasi masyarakat, pengelompokan partisipasi masyarakat, tingkatan partisipasi masyarakat, bentuk partisipasi masyarakat, mendorong dan menggerakkan partisipasi, motif partisipasi masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat dalam konteks pemberdayaan masyarakat, keberhasilan partisipasi masyarakat. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Program menjelaskan PNPM Mandiri, ruang lingkup, tridaya PNPM Mandiri serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat.

di masyarakat kelurahan Bugul Kidul. S

penelitiannya menggunakan penelitian d

menggambarkan tentang poses partisipasi masyara

BAB IV : Penyajian data dan analisa data, untuk menganalis

di dalam penelitian ini, peneliti memilih men

analisis interaktif model analisis interaktif ini m

tahap, yaitu: reduksi data (*data reduction*); peny

display); menarik kesimpulan/verifikasi (

verification)

BAB V : Penutup terdiri dari kesimpulan yang menjawab

masalah secara singkat dan saran berisi tentang m

di dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan analisis interaktif model analisis interaktif ini merupakan tahap, yaitu: reduksi data (*data reduction*); penyajian (*display*); menarik kesimpulan/verifikasi (*verification*)

Penutup terdiri dari kesimpulan yang menjawab masalah secara singkat dan saran berisi tentang masalah agar ke depan pihak-pihak yang terkait melakukan monitoring dalam melaksanakan program pemeliharaan supaya dapat dijadikan sebagai bahan panduan. membutuhkan yang bersifat konstruktif, dan merupakan hasil akhir dari keseluruhan skripsi ini.

LANDASAN TEORI

Suatu definisi partisipatif baik deskriptif maupun normatif terutama harus menekankan bahwa segala perkembangan masyarakat dan pembangunan merupakan proses yang hanya bisa berhasil jika hanya dijalankan bukan saja bagi tetapi juga bersama dengan dan oleh rakyat sendiri, terlebih orang miskin.⁴ Masyarakat harus ikut secara aktif dalam menentukan dan menjalankan upaya dan program bantuan dari pemerintah, dan dengan demikian dapat menentukan keadaan hidup mereka sendiri mulai dari saat pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasannya hingga perawatan suatu program.

³ Loekman Soetrisno, *Menuju Masyarakat Partisipatif* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hal. 207
⁴ Johannes Muller, *Perkembangan Masyarakat Lintas-Ilmu* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 256

Sebagai sebuah tujuan partisipasi menghasilkan pemberdayaan yakni setiap orang berhak menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya.

Partisipasi Sebagai Cara	Partisipasi Sebagai Tujuan
Berimplikasi pada penggunaan partisipasi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.	Berupaya memberdayakan rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan mereka sendiri secara lebih berarti.
Merupakan suatu upaya pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan program.	Berupaya untuk menjamin peningkatan peran rakyat dalam inisiatif-inisiatif pembangunan.
Penekanan pada mencapai tujuan dan tidak terlalu pada aktifitas partisipasi itu sendiri.	Fokus pada peningkatan kemampuan rakyat untuk berpartisipasi bukan sekedar mencapai tujuan-tujuan proyek yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Lebih umum dalam program-program pemerintah, yang pertimbangan utamanya adalah untuk menggerakkan masyarakat dan melibatkan mereka dalam meningkatkan efisiensi system penyampaian.	Pandangan ini relatif kurang disukai oleh badan-badan pemerintah. Pada prinsipnya LSM setuju dengan pandangan ini.
Partisipasi umumnya jangka pendek.	Partisipasi dipandang sebagai suatu proses jangka panjang.
Partisipasi sebagai cara merupakan bentuk pasif dari partisipasi.	Partisipasi sebagai tujuan relatif lebih aktif dan dinamis.⁵

15

berkelanjutan dengan proses jangka panjang. S
partisipasi sebagai cara hanya membutuhkan progra
tetapi masyarakat tidak peduli baik tidaknya untu
proses yang dibutuhkan jangka pendek.

b. Pengelompokan Partisipasi Masyarakat

Ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama
dengan praktek pembangunan masyarakat yang demok
Partisipasi politik merupakan representasi dal
Tujuannya untuk memengaruhi dan mendudukkan wa
lembaga pemerintahan daripada melibatkan langse
dalam proses-proses-proses pemerintahan. Par

b. Pengelompokan Partisipasi Masyarakat

Ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama jika dikaitkan dengan praktek pembangunan masyarakat yang demokratis antara lain: Partisipasi politik merupakan representasi dalam demokrasi. Tujuannya untuk memengaruhi dan mendudukkan wakil rakyat dalam lembaga pemerintahan daripada melibatkan langsung masyarakat dalam proses-proses-proses pemerintahan. Partisipasi sosial merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat dipandang sebagai *beneficiary* pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari penilaian kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan sampai pemantauan dan evaluasi program.

Partisipasi warga ialah proses pengambilan keputusan langsung dalam kebijakan publik. Warga berpartisipasi secara langsung dalam

setiap kegiatan yang dapat mempengaruhi masyarakat pada tataran lembaga formal maupun pada tataran lembaga informal. Sehingga masyarakat dengan sendirinya tahu akan pentingnya partisipasi dalam pengambilan keputusan.

c. Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Karena konsep partisipasi dalam perkembangan pembangunan makna yang luas dan memiliki arti yang berbeda-beda, maka perlu ada definisi apapun yang disebut partisipasi. Sehingga untuk mengukur dan memaknainya dapat digunakan tingkatan partisipasi masyarakat. *Development Bank* (ADB) tingkatan partisipasi dari tingkat terendah sampai tertinggi sebagaimana disebutkan bahwa be

Karena konsep partisipasi dalam perkembangan makna yang luas dan memiliki arti yang berbeda-beda, maka perlu ada definisi yang lebih apakun yang disebut partisipasi. Sehingga untuk memaknainya dapat digunakan tingkatan partisipasi. *Development Bank* (ADB) tingkatan partisipasi dari yang rendah sampai tertinggi sebagaimana disebutkan bahwa be

Karena konsep partisipasi dalam perkembangan makna yang luas dan memiliki arti yang berbeda-beda, maka perlu ada definisi yang lebih apakun yang disebut partisipasi. Sehingga untuk memaknainya dapat digunakan tingkatan partisipasi. *Development Bank* (ADB) tingkatan partisipasi dari yang rendah sampai tertinggi sebagaimana disebutkan bahwa be

⁶ Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan* (Bandung: Humaniora, 2008), hal. 100

Kolaborasi/pembuatan keputusan bersama, masyarakat bukan sebagai penggagas kolaborasi, tetapi masyarakat dilibatkan untuk merancang dan mengambil keputusan bersama, sehingga peran masyarakat secara signifikan dapat mempengaruhi hasil/keputusan.⁷ Kalau pembuat keputusan masyarakat tidak dilibatkan maka akan terjadi kerancuan yang berdampak negatif rasa kepedulian dan kepemilikan tidak ada. Pemberdayaan/kendali, masyarakat memiliki kekuasaan dalam mengawasi secara langsung keputusan yang telah diambil dan menolak pelaksanaan keputusan yang bertentangan dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan prosedur dan indikator kinerja yang mereka tetapkan bersama. Masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai obyek tetapi juga subyek yang menjalankan program yang direncanakan bersama.

Secara sederhana partisipasi bisa diartikan sebagai keikutsertaan seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam program pembangunan. Pernyataan ini mengandung arti seseorang, kelompok atau masyarakat senantiasa dapat memberikan kontribusi/sumbangan

[illegible]

berpartisipasi diantaranya bentuk-bentuk partisipasi: partisipasi pikiran, yang diberikan partisipan dalam pertemuan atau diskusi. Kehadiran seseorang dalam pertemuan akan mempengaruhi masyarakat yang lain agar dapat ikut serta dalam masyarakat yang sumbangsih pemikiran. Partisipasi tenaga, yang diberikan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan pertolongan bagi orang lain. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dengan memberikan makanan dan minuman seadanya tanpa ada timbal balik (jasa).⁸

Partisipasi ketrampilan dan kemahiran, yang diberikan untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri. Masyarakat

Partisipasi ketrampilan dan kemahiran, yang
 tuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan indu

ng memiliki keahlian agar dapat mendongkrak ka
wirausaha untuk menciptakan lapangan kerja. P
ng diberikan orang sebagai tanda keguyuban, misa
operasi, layad (dalam peristiwa kematian), ko
istiwa pernikahan) dan sebagainya.

yang harus harga.

e. Mendorong dan Menggerakkan Partisipasi

Kondisi-kondisi yang mendorong dan partisipasi adalah sebagai berikut; orang akan berpa mereka merasa bahwa isu atau aktivitas tersebut pent ini dapat efektif jika masyarakat sendiri telah mampu atau aksi, dan telah menominasi kepentingannya bu pada kepentingan orang luar yang memberi tahu m harus dilakukan. Kunci keberhasilan tertumpu pada p masyarakat adalah bagaimana pemilihan isu untu pengembangan masyarakat. Hal semacam ini meneka

e. Mendorong dan Menggerakkan Partisipasi

Kondisi-kondisi yang mendorong dan partisipasi adalah sebagai berikut; orang akan berpartisipasi jika mereka merasa bahwa isu atau aktivitas tersebut penting bagi mereka. Ini dapat efektif jika masyarakat sendiri telah mampu mengidentifikasi masalah atau aksi, dan telah menominasi kepentingannya berdasarkan kepentingan orang luar yang memberi tahu masalah tersebut harus dilakukan. Kunci keberhasilan tertumpu pada partisipasi masyarakat adalah bagaimana pemilihan isu untuk

ini dapat efektif jika masyarakat sendiri telah mampu atau aksi, dan telah menominasi kepentingannya berdasarkan kepentingan orang luar yang memberi tahu masyarakat harus dilakukan. Kunci keberhasilan tertumpu pada masyarakat adalah bagaimana pemilihan isu untuk pengembangan masyarakat. Hal semacam ini menekankan bagi seorang pekerja masyarakat untuk membua kebutuhan dan prioritas yang muncul dari pikiran sendiri, bukan terperangkap dalam mencarinya

Orang harus merasa bahwa aksi mereka
perubahan. Masyarakat mungkin telah menentukan p
prioritas utama, tetapi jika orang tidak percaya bahwa

Masyarakat harus merasa bahwa aksi yang dikerjakan akan memberikan perbedaan pada tingkat individu. Masyarakat harus percaya bahwa suatu isu penting dan aksinya dapat menghasilkan sesuatu.

Berbagai bentuk partisipasi harus diakui dan dihargai. Partisipasi masyarakat sering dipandang sebagai keterlibatan dalam kepengurusan, pertemuan resmi dan prosedur-prosedur lainnya. Hal semacam itu busa saja penting, banyak macam partisipasi masyarakat lain yang sama berharganya. Dalam kisaran luas dari kegiatan partisipasi pengembangan masyarakat. Ada banyak peran seorang masyarakat dapat dan sebenarnya harus berperan. Hal semacam ini perlu dikenali dan dihargai supaya berbagai variasi aktifitas partisipasi sebagai bentuk penting dari partisipasi dan dihargai.

macam itu busa saja penting, banyak macam p
yang sama berharganya. Dalam kisaran luas d
gembangan masyarakat. Ada banyak pera
yarakat dapat dan sebenarnya harus berpera
u dikenali dan dihargai supaya berbagai varia
agai bentuk penting dari partisipasi dan

partisipasinya. Hal ini berarti bahwa isu-isu manajemen, waktu dan lokasi kegiatan serta lingkungan akan sangat penting dan perlu di

pertemuan dengan masyarakat dan pengambilan keputusan bersifat mengucilkan bagi banyak orang, khususnya bagi mereka yang tidak bisa berpikir cepat, tidak ingin menginterupsi, kurang percaya diri atau tidak memiliki kemahiran dalam berbicara. Prinsip yang penting kaitannya dengan isu struktur dan proses adalah masyarakat sendiri yang harus mengontrol struktur dan proses, dan menentukan bentuk mana yang akan diadopsi.

Gaya yang berbeda akan cocok untuk masyarakat yang berbeda, dan tidak ada satupun cara benar yang berlaku bagi semua masyarakat. Gaya yang dipaksakan dari luar akan hampir pasti tidak berhasil. Meskipun bermanfaat dan boleh-boleh saja bagi seorang pemimpin, masyarakat untuk membuat orang peduli akan kemungkinan

Gaya yang berbeda akan cocok untuk masyarakat yang berbeda, dan tidak ada satupun cara benar yang berlaku bagi semua masyarakat. Gaya yang dipaksakan dari luar akan hampir pasti tidak berhasil. Gaya yang dipaksakan meskipun bermanfaat dan boleh-boleh saja bagi seorang individu, tetapi akan merugikan masyarakat untuk membuat orang peduli akan kemungk

alternatif dalam melakukan sesuatu, keputusan harus dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Perbaikan kondisi hidup masyarakat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dapat menggerakkan partisipasi masyarakat.

Agar perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat dapat menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, usaha itu: disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Pada gilirannya, partisipasi masyarakat sebagai pembangunan dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi hidup masyarakat yang bersangkutan. antara partisipasi masyarakat dengan kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk berkembang secara mandiri, terdapat kaitan yang erat sekali. Kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan masyarakat itu untuk berkembang secara mandiri. Menurut sumber, partisipasi masyarakat dalam pembangunan menumbuhkan kemampuan masyarakat. Partisipasi masyarakat dan kemampuan masyarakat itu berkembang secara mandiri ibarat satu mata uang, tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dibedakan. Masyarakat yang mempunyai kemampuan ber-

secara mandiri bisa membangun dengan atau tanpa berkoordinasi dengan pihak lain.

Kemampuan yang dimaksud dapat ditumbuhkan. Sejalan dengan hal tersebut, Soedjatmoko dan Soedjatmoko (1990) menyatakan bahwa partisipasi (*vertical*) masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dapat meningkatkan rasa percaya pada kemampuan sendiri (*self reliance*) masyarakat.

⁰ Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1990), hal 104

sby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berkemampuan berkembang secara mandiri tunjangan bersangkutan secara sadar dan bebas memilih dan menentu hal, menyerap suatu nilai, atau menerima suatu tugas untuk belajar dari hal-hal yang kecil untuk kemudian menjadi hal yang lebih besar, mempunyai kemampuan (*confidence*), menentukan memutuskan sendiri dikehendakinya. Kemampuan masyarakat untuk bermandiri berkorelasi positif dengan kemampuannya untuk dan juga dengan kemampuannya meningkatkan masyarakat.

f. Motif Partisipasi Masyarakat

yang berkemampuan berkembang secara mandiri tunjangan bersangkutan secara sadar dan bebas memilih dan hal, menyerap suatu nilai, atau menerima suatu tugas untuk belajar dari hal-hal yang kecil untuk kemudian menjadi hal yang lebih besar, mempunyai kemampuan (*confidence*), menentukan memutuskan sendiri dikehendakinya. Kemampuan masyarakat untuk bermandiri berkorelasi positif dengan kemampuannya untuk dan juga dengan kemampuannya meningkatkan masyarakat.

f. Motif Partisipasi Masyarakat

yang berkemampuan berkembang secara mandiri tunjangan bersangkutan secara sadar dan bebas memilih dan hal, menyerap suatu nilai, atau menerima suatu tugas untuk belajar dari hal-hal yang kecil untuk kemudian menjadi hal yang lebih besar, mempunyai kemampuan (*confidence*), menentukan memutuskan sendiri dikehendakinya. Kemampuan masyarakat untuk bermandiri berkorelasi positif dengan kemampuannya untuk dan juga dengan kemampuannya meningkatkan masyarakat.

f. Motif Partisipasi Masyarakat

yang berkemampuan berkembang secara mandiri tunjangan bersangkutan secara sadar dan bebas memilih dan menentu hal, menyerap suatu nilai, atau menerima suatu tugas untuk belajar dari hal-hal yang kecil untuk kemudian menjadi hal yang lebih besar, mempunyai kemampuan (*confidence*), menentukan memutuskan sendiri dikehendakinya. Kemampuan masyarakat untuk bermandiri berkorelasi positif dengan kemampuannya untuk dan juga dengan kemampuannya meningkatkan masyarakat.

f. Motif Partisipasi Masyarakat

Persoallany ialah bagaimana mengatur mekanisme mencapai kepuasan itu tidak merugikan anggota masyarakat lain.

Motif sosial ada dua sisi motif sosial, yakni untuk meningkatkan status sosial dan untuk menghindarkan dari terkenanya sanksi sosial (*social control*). Orang akan dengan suka hati berpartisipasi dalam suatu kegiatan pembangunan manakala ketika ia akan membawa dampak meningkatnya status sosialnya. Sebaliknya, negatif orang akan terpaksa berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan karena takut terkena sanksi sosial yang dikucilkan oleh masyarakat).¹¹ Motif semacam ini di-

sosial (*social control*). Orang akan dengan suka hati dalam suatu kegiatan pembangunan manakala ketika akan membawa dampak meningkatnya status sosial negatif orang akan terpaksa berpartisipasi dalam pembangunan karena takut terkena sanksi sosial dikucilkan oleh masyarakat).¹¹ Motif semacam ini di-

Motif keagamaan didasarkan atas dasar kepercayaan yang ada di luar manusia (Tuhan, sesuai

Motif ekonomi, laba (profit) adalah motif ekonomi yang dapat dan bahkan seringkali efektif mendorong orang mengambil keputusan untuk ikut berpartisipasi di dalam kegiatan pembangunan. Pengambilan keputusan yang bersifat ekonomis dapat mengambil dua bentuk strategi, yaitu *maximum profit* dan *minimum cost*. Dalam konteks partisipasi pembangunan ekonomi, masalah yang dihadapi adalah bagaimana pemerintah dapat meyakinkan masyarakat bahwa dengan ikut partisipasi mereka akan mampu menaikkan harkat hidup.¹²

¹² Loekman Soetrisno, *Menuju Masyarakat*, hal. 214

keterlibatannya di dalam pembangunan maka makin
kemungkinan untuk ikut berpartisipasi.

Berdasarkan penjelasan motif-motif partisipasi masyarakat yang telah
dipahami kelima motif dapat bekerja secara parsial maupun secara
Selain itu, untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat maka
cara memanipulasi motif, haruslah ditentukan suatu kombinasi yang
optimal dari berbagai motif partisipasi masyarakat yang mungkin ada.
Sehingga sangat penting mengetahui peta motif yang ada pada diri
seseorang maupun kelompok dan dalam kesatuan masyarakat. Dengan
dengan mengetahui peta motif itu secara tepat maka kemungkinan
untuk melakukan kombinasi yang optimal dari berbagai motif partisipasi
luas.

optimal dari berbagai motif partisipasi masyarakat yang mu
Sehingga sangat penting mengetahui peta motif yang ada
seseorang maupun kelompok dan dalam kesatuan masyarakat
dengan mengetahui peta motif itu secara tepat maka ker
untuk melakukan kombinasi yang optimal dari berbagai mo
luas.

g. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Konteks Pembangunan Masyarakat

memaksimalkan partisipasi, dengan tujuan agar setiap orang dalam masyarakat bisa terlibat aktif dalam proses dan kegiatan pembangunan. Lebih banyak anggota masyarakat yang berpartisipasi akan menghasilkan banyak cita-cita yang dimiliki masyarakat dan proses yang lebih

akan memberikan rangkaian kegiatan partisipatoris selalu dan akan membenarkan persamaan bagi semua anggota masyarakat yang secara aktif terlibat.

Untuk menyelenggarakan suatu program pemerintahan terlebih dahulu sisamakan persepsi atau interpretasi partisipasi. Persepsi dan interpretasi oleh berbagai pihak mengenai pengertian partisipasi masih berbeda-beda. Tingkat partisipasi masyarakat tidak sama tergantung sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam pemecahan suatu masalah yang dihadapi di masing-masing daerah. Sebagai misal; masyarakat bertanggung jawab melaksanakan kegiatan-kegiatan dari program pemerintahan, masyarakat ikut menghadiri pertemuan-pertemuan pemerintah.

gertian partisipasi masih berbeda-beda. Tingkat partisipasi masyarakat tidak sama tergantung sejauh mana masyarakat memahami pemecahan suatu masalah yang dihadapi masyarakat. Sebagai misal; masyarakat bertanggung jawab melaksanakan kegiatan-kegiatan dari program pembangunan masyarakat ikut menghadiri pertemuan-pertemuan

Anggota masyarakat terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan, yang meliputi

Apalagi partisipasi dapat dilihat dalam kaitan dengan partisipasi pada apa yang mungkin dihargai sebagai arus utama proses masyarakat, seperti mengadakan pertemuan umum dengan masyarakat, bidang manajemen dan peran-peran pelayanan sosial.¹³ Partisipasi seperti ini penting dalam pemberdayaan karena modal pertama dengan mengadakan diskusi. Perlu adanya persamaan persepsi atau interpretasi terhadap partisipasi. Persepsi dan interpretasi oleh berbagai pihak tentang pengertian partisipasi yang berbeda-beda. Tingkat partisipasi masyarakat tidak sama tergantung sejauh mana keterlibatan mereka dalam pemecahan masalah yang dihadapi.

¹³ Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternatif Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Jogjakarta: Ar -Ruz Media, 2007), hal. 72

Bentuk partisipasi diatas diharapkan secara spontanitas, namun sering tidak terjadi sehingga perlu ada upaya dari luar. Dan partisipasi tidak akan banyak bermanfaat bagi masyarakat yang paling baik adalah melalui fasilitasi. Dengan fasilitasi masyarakat diposisikan sebagai dirinya, sehingga termotivasi untuk berpartisipasi dan berbuat sebaiknya untuk keuntungan dirinya.

¹⁴ Moehar Daniel, Darmawati, Nieldalina, *PRA Participatory Rural Appraisal Pendekatan Efektif Mendukung Penerapan Penyuluhan Partisipatif dalam Upaya Percepatan Pembangunan Pertanian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 60

Upaya-upaya dalam pemberdayaan dalam pelaksanaannya harus ada korelasi satu dengan yang lain antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah memiliki agenda-agenda program penanggulangan kemiskinan tanpa ada dukungan dari masyarakat itu terasa hampa tidak ada gunanya. Jadi harus terikat satu sama lain dalam memajukan dan membangun bangsa.

Najib berpendapat sebagaimana dalam Abu Huraerah menjelaskan keberhasilan partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh: siapa penggagas partisipasi apakah dari pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Untuk kepentingan siapa partisipasi itu dilaksanakan; untuk kepentingan pemerintah atau masyarakat. Siapa yang memegang kendali dari pemerintah pusat, pemerintah daerah atau lembaga donor. Hubungan pemerintah dengan masyarakat apakah ada kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah atau bahkan sebaliknya. Kultural daerah yang memiliki tradisi dalam berpartisipasi (proses pengambilan keputusan melalui musyawarah) cenderung lebih mudah dan berlanjut.

pengelolaan pembangunan. Ekonomi dalam menyiapkan globalisasi dengan menyediakan akses bagi warga misl terlibat atau memastikan bahwa mereka akan memperoleh Adanya kepemimpinan yang disegani dan memiliki komitmen mendorong partisipasi. Serta waktu harus dipersiapkan penerapan partisipasi tidak hanya sesaat tetapi dibutuhkan waktu lama (jangka panjang). Tersedianya jaringan yang menghubungkan antara warga masyarakat dan pemerintah.¹⁵

Dari beberapa hal diatas kalau dikaitkan dengan Mandiri bahwa masyarakat terbantu dengan adanya program Mandiri melalui BKM berdasarkan prosedur yang diinginkan pemerintah. Tetapi yang dilaksanakan hingga saat ini ad

ndiri bahwa masyarakat terbantu dengan ada
ndiri melalui BKM berdasarkan prosedur y
erintah. Tetapi yang dilaksanakan hingga s

Adanya kewenangan partisipasi yang sebenarnya akan muncul. Apabila kita ingin melihat ke bahwa partisipasi benar-benar mampu menjadi pendorong keberhasilan pembangunan, para pengelola pembangunan tidak boleh lagi menganggap rakyat sebagai warga Negara yang pasif tetapi masyarakat harus dilihat sebagai masyarakat bawah yang dapat bicara guna lebih mendorong keberhasilan pembangunan.¹⁶ Kurangnya kepercayaan pemerintah dapat menjadi kendali yang besar karena akan mempengaruhi bagi yang lain. Jika keikutsertaan masyarakat yang tidak berdaya membuat program yang diberikan pemerintah kepada masyarakat hanya sebatas waktu itu saja.

a. Program PNPM Mandiri

¹⁶ Hadi Prayitno dan M Umar Burhan, *Pembangunan Ekonomi Pedesaan* (Yogyakarta: BPFE, 1987), hal. 173

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/ meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Beberapa rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen program sebagai berikut komponen pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk

34

Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengrelawan, dan operasional pendampingan masyarakat; dan pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat wilayahnya.

Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, masyarakat miskin.

Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, masyarakat miskin.

Komponen peningkatan kapasitas pemerintahan di tingkat lokal adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lain untuk mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang baik bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelesaikan masalah hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen

Komponen bantuan pengelolaan dan pengembangan program meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi, dan pengembangan program.¹⁸

b. Ruang lingkup

¹⁸ Tim Pengendali PNPM Mandiri Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri* (Jakarta: Direktorat Jendral Cipta Karya, 2008), hal. 17

[illegible]

Kiat utama dan terpenting adalah bagaimana membuat masyarakat merasa kita (seorang pengorganisir) datang kepada masyarakat dalam cara yang benar-benar wajar dan alamiah, bukan sesuatu yang sudah direkayasa sebelumnya dalam cara-cara yang sangat kaku, atau bahkan terkesan mengada-ada.²⁰ Ini merupakan awal bagi tim fasilitator bagaimana dapat bersatu dengan masyarakat. Karena kegiatan yang dijalankan adalah program pemerintah cenderung bersifat resmi dalam melaksanakan tindakan, terlalu serius, karena ingin tampak mengesankan, tidak dapat disepelekan. Bahkan sekedar ingin dianggap lebih atau berbeda dengan masyarakat

²⁰ Jo Hann Tan dan Roem Topatimasang, *Mengorganisir Rakyat Refleksi Pengalaman Pengorganisasian di Asia Tenggara* (Jogjakarta: Insist Press, 2003), hal. 23

umumnya. Berdasarkan matrik pemetaan korupsi tingkat partisipasi masyarakat dijelaskan;

NO	Bidang Pemetaan Korupsi	Tingkat Resiko	Peluang Korupsi	Aksi penanggulangan
PARTISIPASI MASYARAKAT				
1	Diseminasi secara terbatas informasi mengenai program	Rendah	Informasi dibatasi pada peredarannya atau diberikan hanya pada kelompok tertentu sehingga proposal yang tidak layak mungkin terjadi.	Sosialisasi akan dilaksanakan melalui pertemuan (musyawarah, lokakarya dan focus group discussions) pada tingkat kelurahan sampai provinsi. Sosialisasi tersebut juga mencakup kampanye melalui media massa, seperti surat kabar dan radio. Strategi sosialisasi dipicu untuk membuat masyarakat sadar mengenai tujuan proyek dan peraturannya. Ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa para pelaku mengetahui peran dan tanggung jawab mereka, dan bagaimana membuat masing-masing bertanggung jawab terhadap tindakan mereka.
2	Pemilihan anggota LKM atau BKM	Rendah	Proses pemilihan anggota LKM atau BKM yang tidak transparan sehingga menyebabkan rendahnya integritas.	Proses pemilihan anggota LKM atau BKM akan dilaksanakan melalui proses pemilihan yang transparan dan adil, dengan partisipasi signifikan dari anggota masyarakat. ²¹

²¹ Departemen Pekerjaan Umum, *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan 2008 Bersama Membangun Kemandirian dalam Pengembangan Lingkungan Permukiman yang Berkelanjutan* (Jakarta: Dierktorat Jendral Cipta Karya, 2008), hal 47

terhadap tindakan yang salah. Apabila terjadi yang
maka harus ada pertemuan yang sekiranya dapat me
bagi masyarakat dan BKM.

c. Tridaya PNPM Mandiri

Persoalan kemiskinan yang ada di masyarakat
berakar dari masalah internal kaum miskin itu sendiri.
aspek struktural yang ada di tengah-tengah masyarakat
menenggelamkan mereka ke kubang kemiskinan. Di
diperlukan intervensi dari pemerintah guna meng
kemiskinan di masyarakat.

Persoalan kemiskinan yang ada di masyarakat berakar dari masalah internal kaum miskin itu sendiri. aspek struktural yang ada di tengah-tengah masyarakat menenggelamkan mereka ke kubang kemiskinan. Diperlukan intervensi dari pemerintah guna mengeliminasi kemiskinan di masyarakat.

Persoalan kemiskinan yang ada di masyarakat berakar dari masalah internal kaum miskin itu sendiri. aspek struktural yang ada di tengah-tengah masyarakat menenggelamkan mereka ke kubang kemiskinan. Diperlukan intervensi dari pemerintah guna mengeliminasi kemiskinan di masyarakat.

Inti kegiatan PNPM Mandiri di masyarakat adalah proses menumbuhkembangkan kemandirian dan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dari, oleh, dan untuk masyarakat, melalui proses pembelajaran dan pembelajaran universal kemasyarakatan, serta prinsip-prinsip berkelanjutan (*sustainable development*).²²

²² Ibid, hal. 19

kolektif oleh masyarakat itu sendiri. Artinya, setiap orang, miskin maupun tidak, harus mempunyai tanggung jawab menanggulangi masalah kemiskinan.

Adapun pembelajaran BKM mandiri yang sebelumnya telah mencetuskan P2KP untuk *channeling* program tridaya melalui BKM, maka P2KP tahap 1 yang dengan bantuan teknis dari P2KP melalui *extention* P2KP 1 yang berhasil mencapai tingkat mandiri didorong dan diberi peluang untuk diikutsertakan dalam program aspek tridaya, antara lain: program link ke lembaga keuangan formal untuk kegiatan kredit mikro, melalui kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya, serta program *pro-poor growth* kinerjanya hingga mencapai tingkat mandiri. Forum BKM n

extention P2KP 1 yang berhasil mencapai tingkat mandiri, didorong dan diberi peluang untuk diikutsertakan dalam program aspek tridaya, antara lain: program link ke lembaga formal untuk kegiatan kredit mikro, melalui kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya, serta program *pro-poor growth* kinerjanya hingga mencapai tingkat mandiri. Forum BKM

Mendorong BKM-BKM mandiri dan forum BKMnya
sama dengan pemerintah kota/kabupaten serta kelompok
setempat untuk mampu membangun dan memperkuat

Tidak hanya itu, siklus PNPM Mandiri juga menjadi media yang output-nya merupakan konsep *tridaya* (sosial, ekonomi dan sarana-prasarana masyarakat) dari program itu. Dengan *tridaya* PNPM pemerintah berharap dapat membangun akses-akses kemasyarakatan yang dapat dijangkau oleh siapa pun. Misalnya, *sosial*; mengadakan pertemuan tiap bulan pelaksanaannya konsultan manajemen pusat (KMP) dan konsultan manajemen wilayah (KMW), tim fasilitator hasilnya meningkatkan kesadaran dan fungsi kontrol sosial terhadap program penanggulangan kemiskinan. Mengadakan pelatihan dan lokakarya yang melaksanakan tim fasilitator, pelatihan yang dilaksanakan oleh masyarakat adalah pelatihan tata rias itupun hasil dari pertemuan dengan fasilitator dan BKM. Sehingga pelatihan dapat memberikan kontribusi sharing pendapat antara masyarakat dengan pelaku. *Ekonomi*; adanya dana pinjaman bergulir berkelanjutan artinya masyarakat meminjam dana untuk usaha yang dilakukannya dengan pengembalian yang ringan tiap minggu bahkan tiap bulannya. Yang melaksanakan BKM supaya nantinya terbentuknya keuangan yang

41

terlebih dahulu yaitu mengadakan pertemuan antara masyarakat dan fasilitator. Pertemuan tersebut untuk menentukan wilayah mana yang benar-benar membutuhkan prasarana/sarana li. Usulan-usulan yang disampaikan dari masyarakat ditampung sehingga muncul perdebatan yang hebat karena masyarakat ingin wilayahnya dibangun infrastruktur.

Setelah semua sudah terkumpul fasilitator, B masyarakat mencari masalah (identifikasi masalah), menentukan prioritas dan pembentukan panitia. Hal semacam yang harus dalam melibatkan partisipasi masyarakat agar pem prasarana/sarana sanitasi pembangunan yang difungsikan memperbaiki buruknya sanitasi di suatu wilayah RT ma

Setelah semua sudah terkumpul fasilitator, B masyarakat mencari masalah (identifikasi masalah), menentukan prioritas dan pembentukan panitia. Hal semacam yang harus dalam melibatkan partisipasi masyarakat agar pem prasarana/sarana sanitasi pembangunan yang difungsikan memperbaiki buruknya sanitasi di suatu wilayah RT maka dapat terwujud. Program yang sudah dilaksanakan pembangunan RW, pavingisasi, pembangunan sanitasi pembuangan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi

B. PENELITIAN TERDAHULU

Adapun penelitian sebelumnya tentang partisipasi masyarakat oleh Naila Fauziah 2006 tentang partisipasi warga proses pemberdayaan masyarakat pedesaan (kajian sosiologis tentang pembangunan masyarakat di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar). Kesimpulannya proses pembangunan yang terjadi pada masyarakat di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar tersebut adalah diawali dari menumbuhkan kesadaran pada warga masyarakat, kemudian mengajak mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Dan untuk menumbuhkan partisipasi tersebut diperlukan pembinaan terhadap mentalitas yang berjiwa pembangunan.

Serta pembangunan masyarakat yang terjadi di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar bisa berjalan dengan sukses berkat peran aktif dari lembaga-lembaga social yang ada di desa Tunjung tersebut terutama BPD, PKK dan BAZIS yang tak kenal lelah memberikan penyuluhan-penyuluhan atau penjelasan-penjelasan sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga menumbuhkan kesadaran pada diri untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan khususnya pembangunan masyarakat.

Sedangkan tentang proses pemberdayaan masyarakat melalui program system manajemen pembangunan partisipatif (studi tentang partisipasi masyarakat melalui program system manajemen pembangunan partisipatif di Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan) oleh Wahyu Yuli

Dan relevansinya ada berdasarkan atas etos kerja masyarakat. Karena untuk meningkatkan taraf hidup dalam pembangunan berlandaskan kesanggupan manusia untuk mengubah dirinya sendiri tanpa membebankan kepada orang lain dengan cara bekerja keras, ulet, sabar dan tidak putus asa dengan bersikap optimisme.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pertimbangan dalam penelitian kualitatif bahwa *pertama*, pendekatan kualitatif lebih menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana tertulis dalam rumusan masalah dengan cara berfikir formal dan argumentatif. *Kedua*, pendekatan kualitatif berupaya menceritakan proses-proses pemberdayaan secara utuh oleh PNPM Mandiri tanpa adanya subyektifitas dari penulis sehingga dapat diharapkan hasil yang didapatkan merupakan realita yang sesungguhnya memang benar-benar terjadi di masyarakat kelurahan Bugul Kidul. Dalam penerapannya peneliti menggunakan kualitatif yang menceritakan tentang gambaran partisipasi di Kelurahan Bugul Kidul.

Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian diskriptif. Pertimbangannya jenis penelitian diskriptif dalam penelitian kualitatif dibutuhkan diskripsi data dengan kata-kata atau gambar bukan mengakakan data. *Kedua*, relevansi penelitian diskriptif dengan obyek penelitian, yakni tingkat partisipasi masyarakat terhadap PNPM Mandiri di Kelurahan Bugul Kidul. Dengan jenis penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara sistematis data yang akurat tentang partisipasi masyarakat dan faktor upaya meningkatkan dan menghambat program PNPM Mandiri.

B. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini agar berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan, maka peneliti berusaha memanfaatkan informan untuk membantu secara cepat dan tepat dalam menggali informasi yang berkenaan dengan judul penelitian. Informan diharapkan tahu betul mengenai kondisi dan situasi lapangan penelitian karena benar dan tidaknya penelitian ini banyak ditentukan informasi yang diperoleh dari mereka.

1. Jenis Data

Dalam menetapkan sebuah informasi yang diperlukan dalam menjawab bentuk pertanyaan atau masalah yang dirumuskan, maka disini penulis akan menjelaskan jenis datanya. Kalau ditinjau dari intensitasnya data dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

a. Jenis Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa interview, observasi, merupakan penggunaan instrument yang harus dirancang sesuai dengan tujuannya. Berdasarkan sumber data yang termasuk pada data primer yaitu *person* dengan melakukan wawancara, observasi melalui informan kunci dan informan pendukungnya. Paper juga berkaitan dengan data primer seperti pada anggaran dasar BKM Sejahtera, pembukuan ekonomi bergulir.

Yaitu bentuk informasi yang telah dikumpulkan pihak lain. Jadi, dalam hal ini peneliti tidak memperoleh data dari sumbernya. Adapun tiga jenis data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh dari arsip data, data resmi dari pemerintah dan bahan lain yang dipublikasikan.¹ Kalau dikaji dari sumber datanya place merupakan hasil yang sudah di kerjakan oleh BKM Sejahtera yang bersifat diam atau bergerak seperti bidang sosial adanya pelatihan tata rias, bidang lingkungan seperti hasil bangunan proyek pembangunan dan paper mengenai data arsip yang berkaitan dengan PNPM Mandiri serta BKM Sejahtera baik dalam hal dokumentasi foto, surat penting dan hasil pelaporan BKM Sejahtera.

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.

Untuk mempermudah dalam mengidentifikasi sumber data penulis mengklasifikasikannya menjadi 3 *p* dari bahasa Inggris yaitu:

- ¹ James A Black dan Dean J Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 1999), hal. 351

b. *Place*, adalah sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam atau bergerak. Penelitian ini bertempat di kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan. Yang termasuk sumber data tempat dalam hal ini yaitu: tempat pelaksanaan program seperti pavingisasi, pembangunan sanitasi pembuangan air, tempat pembangunan balai RW, kantor BKM sejahtera, tempat mengadakan pelatihannya.

c. *Paper*, adalah sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain.² Hal ini meliputi arsip-arsip penting mengenai identitas PNPM Mandiri misalnya berupa sarana dan prasarana yang sudah dilaksanakan programnya, data-data dokumentasi PNPM 2008, hasil pelaporan BKM.

- ### C. Tahap-Tahap Penelitian

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek* (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2006), hal. 129

1. Invention

Tahap ini adalah tahap pra lapangan atau tahap studi pendahuluan. Dalam tahap ini peneliti berusaha menentukan deskripsi sasarannya, obyek atau lokasi penelitian yang ada, kemudian dari deskripsi tersebut diharapkan mampu menghasilkan rancangan dan susunan penelitian di setting tertentu yang sekiranya sesuai dengan fokus penelitian yang dicapai agar diperoleh hasil yang sesuai dengan harapan peneliti.

Dalam pelaksanaan tahap ini, peneliti berusaha melakukan observasi dengan cara melakukan pengamatan berperan aktif, yaitu menjadi bagian dari aktivitas yang dijadikan obyek penelitian yang berlangsung. Jadi pada intinya tahap penelitian ini merupakan

Tahap ini adalah tahap pra lapangan atau tahap studi pendahuluan. Dalam tahap ini peneliti berusaha menentukan deskripsi secara umum dari obyek atau lokasi penelitian yang ada, kemudian dari usaha tersebut diharapkan mampu menghasilkan rancangan dan susunan penelitian atau setting tertentu yang sekiranya sesuai dengan fokus penelitian yang hendak dicapai agar diperoleh hasil yang sesuai dengan harapan peneliti.

Dalam pelaksanaan tahap ini, peneliti berusaha melakukan observasi dengan cara melakukan pengamatan berperan serta atau ikut menjadi bagian dari aktivitas yang dijadikan obyek penelitian tersebut berlangsung. Jadi pada intinya tahap penelitian ini merupakan eksplorasi

terhadap lokasi penelitian yang pada dasarnya untuk mengetahui gambaran umum BKM Sejahtera, menentukan susunan dan rancangan penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah, sehingga dari tahap itulah kemudian peneliti berusaha menetapkan judul penelitian yang akan dijadikan pembahasan lebih lanjut.

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hal. 126

2. Discovery (temuan)

Tahap discovery adalah tahap penemuan data dan pengumpulan data. Dalam pelaksanaannya peneliti berusaha menemukan dan mengumpulkan data yang relevan dengan judul penelitian. Karena tahap ini merupakan tahap penemuan dan pengumpulan data, maka peneliti berupaya untuk memperolehnya dengan beberapa metode pengumpulan data antara lain; observasi, wawancara, dokumentasi atau catatan peneliti. Karena peneliti merupakan instrumen utama, maka dalam tahap ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung dan diskusi bersama dengan informan.

3. Interpretation

Tahap interpretation merupakan tahap analisa atau evaluasi data yang telah diperoleh peneliti pada tahap discovery. Analisa atau evaluasi data dilakukan peneliti dengan cara membandingkan data hasil temuan dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh di lapangan.⁴ Kegiatan analisa data ini pada dasarnya terletak penggambaran atau penuturan tentang upaya yang kita pahami dari permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

Maka dalam hal ini ada beberapa poin yang harus diperhatikan oleh peneliti antara lain: merinci fokus masalah yang benar-benar menjadi pusat perhatian untuk menelaahnya lebih dalam. Melacak, mencatat dan mengorganisasikan setiap data yang relevan untuk masing-masing

⁴ *Ibid*,.... hal. 151

4. Explanation

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

[illegible]

2. Wawancara

3. Dokumentasi

52

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berusaha melakukan analisis data langsung dengan cara observasi ke lapangan untuk menghindari kemungkinan terdapat kesalahan. Distorsi dapat muncul dalam diri peneliti dan juga informan. Oleh karenanya untuk meminimalisir distorsi, peneliti perlu untuk mengecek kembali data tersebut sebelum diproses dalam bentuk data tulisan dengan harapan tulisan tersebut sudah terhindar dari sekecil mungkin kesalahan. Teknik Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu atau data yang lain di luar data yang didapat oleh peneliti untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.⁷

Teknik triangulasi yang paling sering dipakai adalah pemeriksaan melalui sumber data lainya yaitu peneliti berusaha membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif, diantaranya peneliti lakukan dengan cara sebagai berikut membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan data hasil wawancara dengan dokumentasi yang berkaitan, membandingkan data hasil pengamatan atau observasi dengan data yang dihasilkan dari dokumentasi di lapangan. Agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diakui dan diterima oleh para pengambil manfaat, maka peneliti melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,,,,,,, hal. 324

PENYAJIAN DATA DAN ANALISA DATA

1. Diskripsi Wilayah Penelitian

Kelurahan Bugul Kidul merupakan salah satu kelurahan yang berada di Wilayah Kota Pasuruan. Kelurahan Bugul Kidul terletak di Kecamatan Bugul Kidul, tepatnya di bagian tengah sisi utara dan terbagi atas 6 RW dan 43 RT. Kelurahan Bugul Kidul mempunyai batas-batas administratif sebagai berikut:¹

Sebelah Timur : Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul

Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 1,2 km

[illegible]

Jarak dari Ibukota/ kabupaten lain : 17.0 km

1) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk kelurahan Bugul Kidul secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi
1	Laki-laki	3488
2	Perempuan	3538
Jumlah		7026

2) Jumlah Penduduk Menurut Agama

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Frekuensi
1	Islam	6766
2	Protestan	193

² Data monografi Kelurahan Bugul Kidul

2) Masalah Sosial

Tabel I.7

Masalah Sosial Kelurahan Bugul Kidul

No	Masalah Sosial	Frekuensi
1	Anak Terlantar	4
2	Mantan Napi	18
3	Wanita Tuna Susila	2
4	Korban Narkotika	2
5	Anak Nakal	8
6	Korban Bencana Alam	300
7	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	48
8	Keluarga Fakir Miskin	317
9	Lanjut Usia Terlantar	8
10	Anak Jalanan	10
11	Keluarga berumah tak layak huni	16
12	Lainnya (tidak ada masalah sosial)	6293
	Jumlah	7026

Sumber : Data monografi Kelurahan Bugul Kidul Tahun 2007

3) Anggaran Belanja

Tabel I.8

No	Anggaran Belanja Kelurahan	Rp.
1	Rencana Anggaran	58.000.000,00
2	Realisasi Anggaran ³	58.000.000,00

³ Data sekunder dari BPS Kota Pasuruan, Kecamatan Bugul Kidul dalam Angka2008, hal. 108

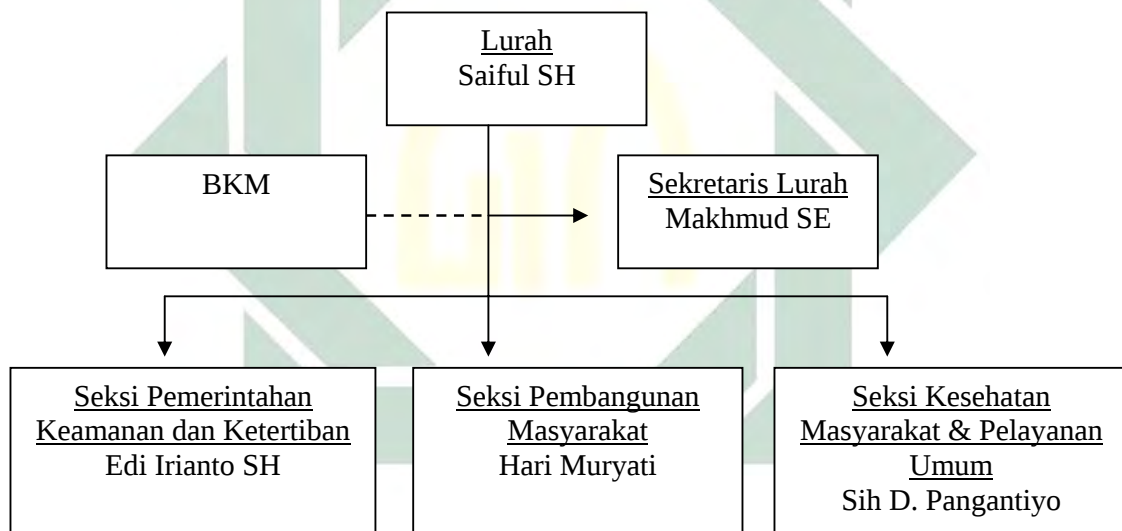
4) Sumber Penerimaan

Tabel I.9

Sumber Penerimaan

No	Sumber Penerimaan/tahun	Rp.
1	Swadaya	1.000.000,00
2	Bantuan ⁴	60.000.000,00

e. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan



Sumber : Ruang Kantor Sekretaris Kelurahan

2. Gambaran Umum BKM

a. Sejarah BKM Sejahtera

Latar belakang pembentukkkan BKM adalah bersumber pada penetapan kebijakan P2KP oleh pemerintah tahun 2000. Proyek ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama proyek, mulai dari

⁴ Data sekunder dari BPS Kota Pasuruan, Kecamatan Bugul Kidul dalam Angka2008, hal. 108

tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan dengan intensitas keterlibatan sampai pada tingkat pengambilan keputusan. Cara yang ditempuh yaitu menyediakan bantuan keuangan serta bantuan teknis yang membangun rasa saling mempercayai antar berbagai pihak yang terkait. Berdirinya BKM pada hari sabtu 13 september 2003 bertempat di Balai Kelurahan Bugul Kidul, Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, dilaksanakan rembug warga Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dalam rangka membentuk badan keswadayaan masyarakat (BKM) Kelurahan Bugul Kidul. Warga dalam rembug tersebut, selain telah memutuskan untuk membentuk BKM juga memilih pengurus/anggota BKM masa bakti 3 tahun mulai 2003-2006, 2007-2009 dan seterusnya sejak pelaksanaan rembug tersebut serta telah menyepakati Anggaran Dasar BKM.

Menyadari sepenuhnya bahwa untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang lestari dan berkesinambungan diperlukan sebuah badan keswadayaan yang secara terus menerus mampu menjadi wadah membangun kebersamaan. Yang membentuk adalah fasilitator kelurahan (faskel) Berri Nurfandi dari Blitar. keberadaan BKM serta seluruh asetnya yang dimulai melalui proses rembug warga dengan melibatkan komponen masyarakat di Kelurahan Bugul Kidul ini adalah merupakan milik masyarakat secara keseluruhan. BKM telah di notariskan di Malang tanggal 12 Desember

anggaran dasar BKM Sejahtera. Semata-mata diberi masyarakat untuk melakukan administrasi berpautan pencatatan kenotariatan yang diperlukan untuk melakukan fungsi BKM sebagaimana telah digariskan dalam isi anggaran BKM Sejahtera Kelurahan Bugul Kidul.

Sebelumnya telah sering diadakan sosialisasi oleh kelurahan Bugul Kidul ke berbagai Rukun Warga (RW) dan Tetangga (RT) beserta mekanisme terapannya. Juga memberikan pengarahan dan wawasannya agar pelaksanaan pemerintah di wilayah Kecamatan Bugul Kidul dapat berjalan efektif.

Mengenai nama BKM di kelurahan Bugul Kidul,

Sebelumnya telah sering diadakan sosialisasi oleh kelurahan Bugul Kidul ke berbagai Rukun Warga (RW) dan Tetangga (RT) beserta mekanisme terapannya. Juga memberikan pengarahan dan wawasannya agar pelaksanaan pemerintah di wilayah Kecamatan Bugul Kidul dapat berjalan efektif.

Mengenai nama BKM di kelurahan Bugul Kidul,

Mengenai nama BKM di kelurahan Bugul Kidul, sepakat memakai nama BKM “Sejahtera” dalam anggota BKM. Dari rembug masyarakat adalah rembug, pertemuan atau musyawarah yang diikuti oleh para utusan masyarakat yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat sendiri. BKM adalah lembaga yang mandiri dan independen yang dibentuk oleh utusan masyarakat di Kelurahan Bugul Kidul dengan tujuan utama untuk melakukan pem

KSM adalah suatu kelompok masyarakat yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang yang dibentuk berdasarkan kesukarelaan dan memiliki ikatan social, memiliki tujuan ekonomi yang sama, tujuan social yang sama, tujuan pembelajaran yang sama dan domisili yang sama. UPK adalah salah satu gugus tugas dalam BKM yang berfungsi untuk mengelola keuangan dan melaksanakan sistem pembukuan termasuk didalamnya membuat perencanaan keuangan serta secara periodik melaporkan berbagai hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan kepada BKM.

Sebagai lembaga yang dipimpin secara kolektif-kolegial dari suatu organisasi masyarakat warga yang berbentuk BKM berfungsi utama sebagai dewan pengambilan keputusan, yang dilakukan melalui proses pengambilan keputusan secara partisipatif, demokratis dan transparan. Sebagai sumber energi dan inspirasi untuk membangun prakarsa dan kemandirian warga, yang secara damai berupaya memenuhi kebutuhan atau kepentingan warga bersama, memecahkan persoalan bersama dan/atau menyatakan kepedulian bersama utamanya dikaitkan dengan kemiskinan dengan tetap menghargai hak pihak lain

Sebagai organisasi masyarakat warga, BKM sejahtera diharapkan benar-benar mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, agar mereka benar-benar terlibat aktif dan intensif dalam proses pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan orang miskin. Sebagai organisasi masyarakat warga, BKM sejahtera merupakan wadah perjuangan dan wadah aspirasi warga masyarakat kelurahan, khususnya dalam kaitan dengan penanggulangan kemiskinan.

⁶ Ibid

c. Kelembagaan dan Keanggotaan BKM Sejahtera

BKM Sejahtera Mempunyai alat kelembagaan sebagai rembug masyarakat, anggota badan keswadayaan, UPK dan BKM sejahtera di kelola secara kolektif kolegial (PRB). Dengan menunjuk dan/atau memilih dalam rapat anggota BKM seorang koordinator. Semua anggota memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan masa pengabdian selama 3 tahun terhitung sejak pelaksanaan rembug warga pembentukan BKM dan dapat dipilih kembali pada satu kali periode berikutnya. Untuk seterusnya badan keswadayaan masyarakat sejahterah dapat di pilih untuk pengabdian selama tiga tahun dan sesudahnya dapat dipilih sebanyak-banyaknya dua kali terhitung sejak tanggal rembug

BKM Sejahtera Mempunyai alat kelembagaan sebagai

rembug masyarakat, anggota badan keswadayaan, UPK dan

BKM sejahtera di kelola secara kolektif kolegial (PRE

Dengan menunjuk dan/atau memilih dalam rapat anggota B

Dengan menunjuk dan/atau memilih dalam rapat anggota B
seorang koordinator. Semua anggota memiliki hak dan

seorang koordinator. Semua anggota memiliki hak dan

yang sama dengan masa pengabdian selama 3 tahun terhi

pelaksanaan rembug warga pembetulan BKM dan dapat

kembali pada satu kali periode berikutnya. Untuk seterusnya

badan keswadayaan masyarakat sejahterah dapat di pilih u

pengabdian selama tiga tahunan sesudahnya dapat dipilih

sebanyak-banyaknya dua kali terhitung sejak tanggal rem

nembentukan BKM dengan mempertimbangkan regenerasi

BKM secara bertahap dan berkesinambungan

dapat dibentuk satuan unit gugus tugas yang terdiri dari U
Sejahtera membentuk UPK yang berkedudukan sebagai gu
BKM, bertanggung jawab kepada BKM yang dipilih dan
dalam rapat anggota BKM secara demokratis yang di agenda

menjadi anggota BKM Sejahtera bila memenuhi syarat a
bertaqwa, jujur, amanah, adil, bertanggung jawab, peduli
masyarakat, tidak cacat moral/ hukum, dan bukan pengu
politik. Utusan masyarakat yang terpilih hendaknya
mengakomodir keterwakilan perempuan, dan keterwakila
Utusan masyarakat yang hadir dalam Rembug Warga
perkenankan melakukan kampanye lisan, tertulis atau de
apapun.

Keanggotaan atau kepengurusan BKM berakhir
meninggal dunia, pindah tempat / alamat keluar dari kelura
Kidul, diberhentikan dari jabatannya oleh masyarakat dala
Rembug Warga, mengundurkan diri dari keanggot

perkenankan melakukan kampanye lisan, tertulis atau dengan media apapun.

Keanggotaan atau kepengurusan BKM berakhir apabila seseorang meninggal dunia, pindah tempat / alamat keluar dari kelurahan, pindah ke luar negeri, pindah agama, pindah kewarganegaraan, pindah status sipil, pindah status perkawinan, pindah status pekerjaan, pindah status pendidikan, pindah status kesehatan, pindah status sosial, pindah status ekonomi, pindah status politik, pindah status hukum, pindah status administrasi, pindah status lainnya yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas sebagai pengurus BKM. Keanggotaan BKM juga berakhir apabila seseorang meninggal dunia, pindah tempat / alamat keluar dari kelurahan, pindah ke luar negeri, pindah agama, pindah kewarganegaraan, pindah status sipil, pindah status perkawinan, pindah status pekerjaan, pindah status pendidikan, pindah status kesehatan, pindah status sosial, pindah status ekonomi, pindah status politik, pindah status hukum, pindah status administrasi, pindah status lainnya yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas sebagai pengurus BKM.

meninggal dunia, pindah tempat / alamat keluar dari keluarga
Kidul, diberhentikan dari jabatannya oleh masyarakat dalam
Rembug Warga, mengundurkan diri dari keanggotaan

Bersama masyarakat secara partisipatif me-

Perencanaan Jangka Menengah (3 tahun) program penanggulangan kemiskinan (PJM-Pronangkis) di kelurahan Bugul Kidul BKM ini membuat rencana program tahunan yang didasarkan

harinya di kelolah oleh UPK. Memberikan keputusan seleksi berbagai usulan yang dilakukan oleh UPK dan U yang berawal dari usulan KSM atau dari kelompok lainnya. Membangun transparansi melalui berbagai diantaranya papan pengumuman, sirkulasi laporan kegiatan bulanan, laporan triwulanan, melakukan rapat secara ter melakukan audit keuangan BKM oleh audit in Merumuskan, menyusun dan menetapkan aturan main sanksi) dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan sur masyarakat. Bergerak pada hal-hal yang bersifat pe kebijakan (strategis) dan tidak boleh melaksanakan kegi bersifat operasional (pengelola langsung kegiatan atau proye

harinya di kelolah oleh UPK. Memberikan keputusan seleksi berbagai usulan yang dilakukan oleh UPK dan U yang berawal dari usulan KSM atau dari kelompok lainnya. Membangun transparansi melalui berbagai diantaranya papan pengumuman, sirkulasi laporan kegiatan bulanan, laporan triwulanan, melakukan rapat secara ter melakukan audit keuangan BKM oleh audit in Merumuskan, menyusun dan menetapkan aturan main sanksi) dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan sur masyarakat. Bergerak pada hal-hal yang bersifat pe kebijakan (strategis) dan tidak boleh melaksanakan kegi bersifat operasional (pengelola langsung kegiatan atau proye

c. Uji Pengaruh Redundansi (ORR) dan RSM

UPK adalah salah satu gugus tugas kelembagaan E yang dibentuk untuk penyaluran dan pencairan dana serta meng bergulir yang telah di tetapkan BKM. UPK tidak dipe mengambil keputusan strategis, melainkan hanya me keputusan yang telah di tetapkan BKM. UPK di angk berhentikan oleh badan masyarakat (BKM). UPK yang bertu

UPK dipimpin oleh seorang Manager dan di bantu kasir serta juru tagih. UPK merupakan tenaga profesional yang berhak mendapat gaji sesuai dengan kemampuan BKM, yang besarnya berdasarkan kesepakatan anggota BKM. Semua kegiatan yang dilakukan UPK di pertanggung jawabkan kepada BKM.

Tujuan pembentukan KSM adalah: mendorong warga masyarakat untuk dapat lebih dinamis dalam mengembangkan kegiatan dan nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan. Memudahkan tumbuh dan berkembangnya ikatan-ikatan dan solidaritas social serta semangat kebersamaan antara masyarakat. Mendorong proses pemberdayaan masyarakat berjalan secara efektif dan efesien.

[illegible]

Mengembangkan dan melembagakan tanggung renteng, membangun jaminan karakter antara anggota, menggerakkan keswadayaan modal, meningkatkan dan menertibkan angsuran pinjaman dan menguatkan serta mengembangkan usaha anggota. Membangun sarana prasarana dasar yang benar-benar di butuhkan masyarakat utamanya masyarakat miskin.

Sumber Keuangan (modal) BKM ini diperoleh dari sumber pendanaan yang berasal dari dana BLM dari P2KP, PNPM Mandiri, PAKET yang digunakan untuk KSM usaha ekonomi produktif (modal bergulir), pembangunan sarana prasarana dasar dan pengembangan sosial. Jasa yang dikutip dari dana bergulir yang dikelola oleh KSM yang sebagian penggunaan jasa tersebut untuk penambahan modal BKM. Dana dari bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

69

Desember. BKM Sejahtera dibantu oleh kesekretariatan diwajibkan untuk membuat pembukuan yang rapid an tertib kegiatan BKM, BKM Sejahtera membuat laporan setiap triwul tahunan dan tahunan yang disesuaikan dengan variable penilaian BKM. Dalam pengelolaan keuangan BKM Sejahtera men prinsip tranparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan BKM sebagaimana di maksud ayat (3) pasal ini di umumkan pengumuman yang mudah dibaca dan diketatahui oleh masyarakat. Laporan keungan tahunan BKM Sejahtera harus oleh audit independen dan hasil audit di sampaikan secara dalam warga. Struktur BKM Sejahtera periode 2007-2009 koordinat Sundari, bendahara oleh Hj. Safiudin, anggota UPK oleh Lilik

Penyajian data ini diperoleh dengan teknik interview, observasi, dan dokumentasi melalui Lurah, Sekretaris Lurah, Koordinator BKM, Ketua BKM, RT, dan Masyarakat. Pelaksanaan penelitian ini berlangsung di Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul dengan cara mendokumentasikan dan menginterview masyarakat.

1. PNPM Mandiri Kelurahan Bugul Kidul

71

Dengan demikian PNPM Mandiri memberi wewenang kepada masyarakat Kelurahan untuk membentuk kelembagaannya sesuai keinginan mereka sendiri. Untuk membentuk kelembagaan komunitas yang memadai, maka diperlukan suatu proses yang cukup memakan waktu dan pemikiran sehingga PNPM Mandiri memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan apakah lembaga kemasyarakatan yang sudah ada dapat difungsikan atau tidak. Jika tidak, maka masyarakat perlu membentuk lembaga baru yang beranggotakan seluruh komponen masyarakat seperti Kelompok Swadaya Masyarakat, Tokoh Masyarakat, perwakilan RT/RW yang diberi nama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). BKM inilah yang bertugas menjalankan upaya pemberdayaan komunitas warga kelurahan khususnya yang termasuk ke dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Untuk melaksanakan tugas seperti dimaksud, maka BKM akan menghadapi tiga hambatan besar yakni hambatan yang melekat pada individu masyarakat seperti halnya ketrampilan, pengetahuan, dan motivasi masyarakat yang masih rendah. Hambatan yang terkait dengan ekonomi yaitu seperti kurangnya modal dan peralatan untuk berusaha, kemampuan/ketrampilan berusaha yang sangat minim, serta tidak memiliki akses terhadap pasar. Serta hambatan yang terkait dengan kondisi lingkungan, seperti halnya sanitasi yang tidak sehat, tempat tinggal yang kumuh, sarana prasarana infrastruktur penunjang untuk melakukan usaha tidak mendukung.

Agar terlepas dari ketiga hambatan tersebut, maka di dalam PNPM Mandiri menggunakan strategi Tri Daya, yang meliputi: *Daya Sosial*, yang berusaha menghilangkan hambatan individual dengan cara member bantuan dana hibah guna membiayai kegiatan pelatihan ketrampilan berusaha bagi masyarakat berpenghasilan rendah/miskin. *Daya Usaha/Ekonomi*, yang dimaksudkan untuk menghilangkan hambatan berusaha yakni dengan menyediakan pinjaman dana bergulir untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan bunga rendah. *Daya Lingkungan/Infrastruktur*, yang dimaksudkan untuk menghilangkan hambatan kondisi lingkungan yang buruk dengan jalan menyediakan bantuan dana hibah guna memperbaiki sarana/prasarana dasar lingkungan sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatan usahanya dengan layak.

Sasaran yang ingin dicapai dari program PNPM Mandiri di Kelurahan Bugul Kidul dapat di bagi menjadi sasaran umum dan sasaran khusus. Sasaran secara umumnya adalah bahwa segala bentuk bantuan yang disediakan oleh PNPM Mandiri hanya ditujukan kepada keluarga miskin yang berdomisili di Kelurahan Bugul Kidul. Sedangkan sasaran khususnya adalah bahwa penerima bantuan PNPM Mandiri hanya KSM yang terbentuk dari sekumpulan orang perorang yang berasal dari keluarga miskin guna secara bersama mengikatkan diri untuk menerima, mengelola, bertanggung jawab terhadap bantuan dana yang telah diterimanya. Bentuk bantuan yang disediakan oleh PNPM Mandiri dapat

pelatihan ketrampilan kerja dalam rangka penciptaan lapangan kerja baru.

2. Partisipasi Masyarakat Kelurahan Bugul Kidul dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri

Partisipasi masyarakat Kelurahan Bugul Kidul dalam pelaksanaan PNPM Mandiri dapat dikategorikan cukup aktif. Hal ini terbukti dengan keberhasilan BKM Sejahtera (Laporan Pertanggung-jawaban BKM Periode tahun 2003/2006). Disamping itu juga BKM Sejahtera merupakan BKM yang pertama kali merealisasikan pencairan dana kredit ke KSM di kecamatan Bugul Kidul, sehingga pencairannya harus dihadiri langsung oleh pihak penanggung jawab BKM. Pemerintah Daerah Kota Pasuruan dalam hal ini kepala BKM

2. Partisipasi Masyarakat Kelurahan Bugul Kidul dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri

Partisipasi masyarakat Kelurahan Bugul Kidul dalam pelaksanaan PNPM Mandiri dapat dikategorikan cukup aktif. Hal ini terbukti dengan keberhasilan BKM Sejahtera (Laporan Pertanggung-jawaban BKM Periode tahun 2003/2006). Disamping itu juga BKM Sejahtera merupakan BKM yang pertama kali merealisasikan pencairan dana kredit ke KSM di kecamatan Bugul Kidul, sehingga pencairannya harus dihadiri langsung oleh pihak penanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Pasuruan dalam hal ini kepala BKM Sejahtera.

Partisipasi masyarakat Kelurahan Bugul Kidul dalam PNPM Mandiri dapat dikategorikan cukup aktif. Hal ini tan keberhasilan BKM Sejahtera (Laporan Pertanggung-jawaban BKM Periode tahun 2003/2006). Disamping itu juga BKM merupakan BKM yang pertama kali merealisasikan pencairan dana kredit ke KSM di kecamatan Bugul Kidul, sehingga pencairannya harus dihadiri langsung oleh pihak penanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Pasuruan dalam hal ini kepala E

Keberhasilan tersebut tidak akan pernah diraih oleh Kelurahan Bugul Kidul, apabila kerja keras pengurus tidak oleh adanya partisipasi dari masyarakat. Partisipasi dimaksudkan berupa peran aktif masyarakat dalam mewujudkan atau menegakkan kelembagaan BKM sebagai syarat utama penetapan lokasi Kelurahan target penerima bantuan PNPM Mandiri.

Dari 36 KK di RT 01 RW 03 yang hadir dalam pertemuan sebanyak 16 orang termasuk koordinator BKM Sejahtera. Peran masyarakat khususnya masyarakat kelurahan Bugul Kidul yang tergolong pada keluarga kurang mampu sangat antusias merespon program BKM, terutama dalam mengajukan usulan kredit sebagai KSM. Partisipasi masyarakat tersebut bukan sesuatu yang dianggap sudah wajar adanya, sebab seseorang untuk mengajukan suatu usulan kredit (dalam PNPM Mandiri) diisyaratkan untuk terlebih dahulu membentuk KSM serta membuat/mengisi Formulir Usulan Kredit yang menuntut suatu kecermatan dan keakuratan, utamanya menyangkut rincian kebutuhan, modal swadaya awal, perkiraan pemasaran, dan lain sebagainya.

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Djalil, 9 Juni 2009

Dari keadaan yang demikian itu maka banyak KSM yang mengalami 'frustasi' dan tidak sudi lagi memperbaiki proposalnya, sehingga pada akhirnya mereka tidak jadi mengajukan usulan bantuan kredit dari PNPM Mandiri. Kadar partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri bisa dibilang cukup tinggi, walaupun hanya pada tahapan untuk mengikuti pelaksanaan program saja sedang pada tahapan perencanaan dan pengamanan terhadap keberlangsungan program masih belum nampak. Hal ini terlihat dari antusiasme masyarakat untuk mengikuti program PNPM Mandiri di Kelurahan Bugul Kidul sangat tinggi, walaupun kemampuan BKM untuk memenuhi keinginan para KSM relatif terbatas.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. Sundari Koordinator BKM, 15 Mei 2009

3. Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

a. Menggalakkan Pertemuan/Diskusi PNPM Mandiri

[illegible]

Pihak kelurahan mengundang semua RW dan RT masing-masing RT membawa 8 orang diantaranya ada yang dari elemen masyarakat, lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama hadir dalam sosialisasi yang dikomando langsung oleh lurah Bugul Kidul. Bahkan yang menghadiri acara itu ada fasilitator dan aparat dari kecamatan. Hanya dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama (yaitu sekitar 2 bulan) seluruh komponen masyarakat Kelurahan Bugul Kidul berhasil membentuk kepengurusan BKM, dalam suatu musyawarah warga Kelurahan Bugul Kidul dengan acara tunggal rapat pembentukan dan pemilihan pengurus BKM pada tanggal 12 Desember 2003. Dalam acara sosialisasi yang hadir sekitar 200 orang.¹¹

No	Tingkat	Yang Diundang	Yang Hadir
1	RW	6	200
2	RT	45	
3	Masyarakat 8 org x 45	360	
		411	200

¹¹ Hasil Wawancara dengan Hj. Safiudin Bendahara BKM, 4 Mei 2009

Acara sosialisasi bertujuan untuk memperkenalkan s program PNPM Mandiri yang pada intinya berbeda dengan Jaringan Pengaman Sosial yang telah ada sebelumnya. Di antara dua sampai tiga kali sosialisasi di masing-masing RT terbentuklah KSM di masing masing RW. Yang terbentuk tersebut merupakan salah satu komponen pembentuk BKM aparat RT/RW dan tokoh masyarakat dalam suatu Pertemuan yang telah dilakukan oleh tim persiapan PNPM Kelurahan Bugul Kidul ini sangat efektif menggalang masyarakat setempat, hal ini ditunjukkan oleh keberhasilan Kelurahan Bugul Kidul terbentuk tidak terlalu memakan waktu, yakni hanya sekitar dua bulan saja.¹²

Selanjutnya untuk tahap pematapan PNPM Mandiri Kelurahan Bugul Kidul tetap melaksanakan pertemuan diskusinya adalah pengurus BKM mendatangi acara pertemuan masing-masing RT dan meminta waktu untuk memberikan ke-PNPM Mandiri-an serta perkembangan pelaksanaan Mandiri khususnya yang telah dinikmati oleh masing-mas

Hasil Wawancara dengan Ir. Sundari selaku Koordinator BKM Sejahtera, 12 Jun

Upaya diskusi tentang PNPM Mandiri juga dilaksanakan pengurus BKM dengan memberikan informasi, harapan, serta main PNPM Mandiri kepada seluruh anggota KSM yang bantuan dana kredit yang disajikan pada setiap pencairan dan tangan kontrak kredit ekonomi produktif. Pertemuan dilaksanakan di kantor BKM agar setiap anggota KSM menerima bantuan kredit, dapat melihat dengan mata kepala bagaimana agenda program BKM Sejahtera, jumlah KSM dan warga yang sudah menikmati bantuan PNPM Mandiri, jumlah

bantuan dana kredit yang disajikan pada setiap pencairan dan tanggungan kontrak kredit ekonomi produktif. Pertemuan dilaksanakan di kantor BKM agar setiap anggota KSM menerima bantuan kredit, dapat melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana agenda program BKM Sejahtera, jumlah KSM dan jumlah warga yang sudah menikmati bantuan PNPM Mandiri, jumlah

masing-masing masyarakat ingin di lingkungannya infrastruktur. Masalah yang ditentukan masyarakat langsung ada yang dari pihak BKM dan fasilitator untuk agar prasarana/sarana pembangunan dapat terwujud.

Proses identifikasi masalah yang dilaksanakan di kelurahan Bugul Kidul muncul banyak masalah tetapi hanya tiga masalah yang harus dilaksanakan. Banyak diinginkan masyarakat pembangunan pembuangan air, penerangan jalan, pembangunan balai RW, pembangunan sungai (plengsengan), pembangunan pos kamling

Proses identifikasi masalah yang dilaksa
urahan Bugul Kidul muncul banyak masalah
ya tiga masalah yang harus dilaksanakan.
inginkan masyarakat pembangunan pembuang
erangan jalan, pembangunan balai RW, per

bagai (plengsengan), pembangunan pos kan
ura RT, dan lain sebagainya. Dari macam-ma
syarakat maka akan ditentukan pada skala p
ilaian mana yang benar-benar dibutuhkan mas
menentukan Skala Prioritas

Penentuan skala prioritas memang ditentukan hanya saja BKM sebagai media perantara dalam program. Setelah masalah yang disampaikan dituli

sebagai suatu persiapan untuk keputusan penting dalam prioritas. Sekali prioritas ditetapkan, langkah berikutnya dikatakan merupakan gerakan progresif menuju pelaksanaan. Dalam penentuan prioritas, aspek penilaian dan kebijaksanaan diperlukan bersama-sama dengan kecakapan unik untuk meninjau berbagai rincian yang relevan. Hal ini merupakan bagian dari perencanaan yang biasanya dikatakan paling naluriatif. Penetapan prioritas mungkin dapat jauh lebih baik dibandingkan dengan langkah-langkah lain bila dibuat eksekutif menjadi tindakan yang ditentukan secara jelas. Diantara masalah yang muncul dalam skala prioritas ialah pembangunan pembuangan RW II, pembangunan sanitasi pembuangan air sepanjang 50

perencanaan yang biasanya dikatakan paling naluriiah. penetapan prioritas mungkin dapat jauh lebih b dibandingkan dengan langkah-langkah lain bila dibuat ek menjadi tindakan yang ditentukan secara jelas. Diantara ma muncul dalam skala prioritas ialah pembangunan pembang RW II, pembangunan sanitasi pembuangan air sepanjang 50

d. Pembentukan Panitia

Dalam pembentukan panitia tidak mudah dibuat karena masing-masing memiliki pandangan sendiri-sendiri. Misalnya RT 1 dalam menentukan panitia ternyata yang jadi ketua adalah RTnya sendiri. Masyarakat menganggap yang mungkin

masyarakat tidak ada yang tahu kalau bukan orang a
rumitnya pelaporan yang diinginkan dari pusat mem
bingung dengan apa yang sebenarnya diinginkan da
program. Hal ini merupakan dari ketentuan sebel
proposal tidak hanya kredit tetapi RT mengusulkan
lingkungannya yang harus diperbaiki dan pem
lingkungan di rembug dengan masyarakat sampai
temu apa yang diusulkan dan proposal tersebut melal
penting dari BKM Sejahtera.¹³ Setelah terbentuk
merencanakan pembuatan proposal sesuai dengan pr
direalisasikan.

e. Implementasi Program

Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri yang dilakukan masyarakat secara swakelola berdasarkan prinsip otonomi dan difasilitasi oleh perangkat pemerintahan yang dibantu oleh fasilitator dan konsultan. Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah proses perencanaan selesai dan telah ada keputusan tentang pengalokasian dana kegiatan. Pelaksanaan kegiatan meliputi pemilihan dan penetapan

¹³ Hasil Wawancara dengan Bpk Hadi RT 01, 7 Juni 2009

Pada pelaksanaan kegiatan secara swakelola akan dibutuhkan barang/jasa berupa bahan alat dan tenaga ahli yang dapat disediakan atau tidak dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat, maka dinas teknis terkait dapat membantu masyarakat menyediakan kebutuhan tersebut.

f. Pelaporan

Pelaporan PNPM Mandiri dilaksanakan secara berkala berjenjang melalui jalur struktural (perangkat pemerintah) dan fungsional (konsultan dan fasilitator) guna menjamin aliran informasi secara cepat, tepat dan akurat kepada setiap pemangku kepentingan. Yang dimaksud berkala adalah setiap periode waktu tertentu.

Pelaporan PNPM Mandiri dilaksanakan secara berkala

berjenjang melalui jalur struktural (perangkat pemerintah) dan fungsional (konsultan dan fasilitator) guna menjamin aliran informasi secara cepat, tepat dan akurat kepada setiap pemangku kepentingan. Yang dimaksud berkala adalah setiap periode waktu tertentu, sedangkan berjenjang adalah dari satuan unit kerja tingkat masyarakat sampai tingkat tim pengendali PNPM Mandiri. Sistem dan mekanisme pelaporan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis operasi masing-masing program.

Para pengurus BKM Sejahtera sangat menyadari

partisipasi warga masyarakat kelompok sasaran terhadap

komunikasi kepada masyarakat. Salah satu jalur tersebut yaitu menyebarkan masing-masing satu eksemplar untuk setiap laporan penyelenggaraan program kepada setiap Ketua diteruskan kepada aparat dibawahnya yaitu masyarakat komunikasi lainnya yaitu telah menyediakan papan per yang diletakkan di Balai Kelurahan dan memasang enam b informasi yang khusus berisi informasi ke-PNPM Mand diletakkan di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh selu dari ke enam RW di lingkungan Kelurahan Bugul Kidul.¹⁴

Saluran komunikasi lain yang telah disediakan c Sejahtera adalah berupa kotak saran yang diletakkan di samp pengumuman balai Kelurahan Bugul Kidul. Namun

Saluran komunikasi lain yang telah di
ahtera adalah berupa kotak saran yang diletakk
gumunan balai Kelurahan Bugul Kidul

Dengan demikian keefektifan dari ja

ternyata dapat secara kreatif menggugat yang bersangkutan melunasi tunggaknya. Hal ini dapat dimaklumi, karena termuatnya nama-nama mereka dalam daftar penunggal merasa malu diketahui oleh warga masyarakat lain di wilayah.

h. Pemberian Insentif dan Penghargaan

Upaya lain yang telah dilakukan oleh BKM Bandung rangka meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat manfaat adalah dengan jalan memberi insentif kepada K dapat menunjukkan usaha membina para anggotanya un membayar angsuran tepat waktu setiap bulannya serta tid menunggak membayar angsuran selama masa kontrak berlangsung. Insentif dimaksud yaitu berupa pengembalian

Upaya lain yang telah dilakukan oleh BKM Bandu

Upaya lain yang telah dilakukan oleh BKM Bandungan untuk meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat adalah dengan jalan memberi insentif kepada KSM yang dapat menunjukkan usaha membina para anggotanya untuk membayar angsuran tepat waktu setiap bulannya serta tidak menunggak membayar angsuran selama masa kontrak berlangsung. Insentif dimaksud yaitu berupa pengembalian jumlah uang jasa pinjaman KSM pada bulan terakhir. Selama tersebut ditambah dengan pemberian penghargaan berupa kredit untuk diprioritaskan mendapat pinjaman berikutnya, jika KSM bersangkutan hendak mengajukan lagi usulan bantuan kredit produktif.

Dengan adanya pemberian insentif tersebut ternyata
Sejahtera sangat besar maknanya dalam meningkatkan

Berkaitan dengan ketentuan jasa pinjaman yang BKM Sejahtera 1,5% serta denda bagi para KSM yang m belum lama ini direvisi menjadi dikenakan denda sebesar persen) dari jumlah angsuran bulan yang bersangkutan. dilakukan karena banyak KSM yang belum dapat memb angsuran yang terdiri dari pokok ditambah jasa, seringkali r uang seadanya pada anggota BKM dan baru dimasukka angsuran setelah cukup nilainya pada bulan berikutnya.

Dengan demikian perolehan jasa yang seharusnya BKM pada bulan tersebut menjadi berkurang. Untuk itu a tidak meremehkan kewajibannya untuk membayar angsur

Dengan demikian perolehan jasa yang seharusnya diterima M pada bulan tersebut menjadi berkurang. Untuk itu M tidak meremehkan kewajibannya untuk membayar

Dengan demikian perolehan jasa yang seharusnya diterima BKM pada bulan tersebut menjadi berkurang. Untuk itu agar KSM tidak meremehkan kewajibannya untuk membayar angsuran secara utuh, maka ketentuan denda diberlakukan walaupun nilainya relatif kecil yakni sebesar satu persen dari jumlah tunggakan bulan yang bersangkutan

¹⁶ Anggaran Dasar BKM Sejahtera, 2003

dengan beberapa cara. KSM yang ingin membayar kre langsung datang ke kantor BKM Sejahtera hari senin sampai pada jam kerja pukul 08.00-13.00 wib. Penentuan kelayakan tidaknya ditentukan oleh pengurus BKM dan ketua RT wilayahnya. Karena yang lebih tahu tentang kondisi KSM ketua RT.

j. Struktur Pengurus

Selain dari upaya yang telah dikemukakan sebelumnya, Sejahtera untuk meningkatkan peran serta masyarakat pembangunan khususnya penanggulangan kemiskinan mengadakan reformasi struktur kepengurusannya. Kalau di

j. Struktur Pengurus

Selain dari upaya yang telah dikemukakan sebelumnya, Sejahtera untuk meningkatkan peran serta masyarakat pembangunan khususnya penanggulangan kemiskinan mengadakan reformasi struktur kepengurusannya. Kalau di

Selain dari upaya yang telah dikemukakan sebelumnya, Sejahtera untuk meningkatkan peran serta masyarakat pembangunan khususnya penanggulangan kemiskinan mengadakan reformasi struktur kepengurusannya. Kalau di

Tapi yang ada di BKM Sejahtera pengurusnya masih periode sebelumnya karena dinilai mampu mengemban amanah masyarakat. Hanya saja ada penambahan anggota BKM menyangkut administrasinya saat ini. Pengurus BKM Sejahtera ter-

ada teguran dari kelurahan agar masyarakat benar-benar berpartisipasi dalam melaksanakan program PNPM Mandiri.

4. Hambatan BKM dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Badan Koordinasi Masyarakat Desa, BKM harus mampu melaksanakan proyek PNPM Mandiri tentunya BKM akan menghadapi hambatan dan kendala. Hambatan partisipasi masyarakat sebagai faktor luar tubuh BKM sebagai faktor eksternal, bisa pula berasal dari tubuh BKM sendiri sebagai faktor internal.¹⁸

Kedua faktor tersebut sangat dirasakan pengaruhnya terhadap kelancaran pelaksanaan tugas BKM secara komprehensif. Hambatan yang datang dari unsur luar tubuh BKM dapat berasal dari

dalam mensukseskan program PNPM Mandiri.

4. Hambatan BKM dalam Meningkatkan Partisipasi Ma

hambatan dan kendala. Hambatan partisipasi masyarakat luar tubuh BKM sebagai faktor eksternal, bisa pula be tubuh BKM sendiri sebagai faktor internal.¹⁸

Kedua faktor tersebut sangat dirasakan penga
kelancaran pelaksanaan tugas BKM secara komprehe
yang datang dari unsur luar tubuh BKM dapat berasal
sebagai kelompok sasaran. Berawal dari proses pembe
kebanyakan hanya bergabung sebagai kelompok ka
prasyarat untuk memperoleh bantuan kredit, maka solid
masih sangat kurang. Bertolak dari pernyataan tersebut
bahwa pemberdayaan kelompok yang di rancang untuk
Mandiri belum berjalan seperti yang diharapkan. Pada

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak

Selain dari yang dikemukakan di atas, KSM sebagai masyarakat yang tergolong kurang mampu, maka anggota KSM kelemahan baik fisik maupun mental. Kelemahan tersebut dapat berupa aspek pendidikan dan pengetahuannya yang masih rendah, keuletan dan ketrampilan bekerja/berusaha yang masih kurang, tidak memiliki modal, kondisi ekonomi keluarga dan lain sebagainya. Hal itu dapat menjadi hambatan bagi BKM untuk mengharapkan partisipasi anggota BKM untuk ikut terlibat dalam program PNPM Mandiri. Sebagai ilustrasi, BKM yang dapat diberi bantuan kredit ekonomi produktif harus mampu

aspek pendidikan dan pengetahuannya yang masih rendah, ke-
dan ketrampilan bekerja/berusaha yang masih kurang, tidak
kondisi ekonomi keluarga dan lain sebagainya. Hal itu dapat
hambatan bagi BKM untuk mengharapkan partisipasi anggota B-
ikut terlibat dalam program PNPM Mandiri. Sebagai ilustrasi,
yang dapat diberi bantuan kredit ekonomi produktif harus m-

bagi para anggota KSM yang terpaksa tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran karena kondisi yang sulit yang memungkinkan. Kondisi tersebut terjadi seperti pada saat pandemi tahun pelajaran, menjelang Hari Raya, ataupun saat-saat lain yang mengharuskan masyarakat memprioritaskannya. Selain itu, yang dikemukakan di atas, faktor rongrongan dari oknum yang menyalahgunakan informasi yang tidak benar tentang PNPM Mandiri, sangat merugikan pihak BKM guna mengharapkan partisipasi dari warga masyarakat. Banyak anggota KSM pada awalnya yang memperoleh informasi bahwa bantuan kredit PNPM Mandiri tidak perlu dikembalikan, karena memang untuk orang miskin jadi tidak perlu dikembalikan.¹⁹ Sehingga pihak pengurus BKM pada mulanya agak

Sehingga pihak pengurus BKM pada mulanya

Hasil Wawancara dengan Ibu Jamilah KSM Temulawak, 20 Mei 2009

Kendala selain yang telah dikemukakan di atas juga timbulnya hambatan dari rentannya para anggota KSM dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya, sebagai akibat dari minimnya modal yang dimiliki termasuk yang berasal dari PNPM Mandiri. Untuk mempertahannya produksinya suatu anggota KSM merasakan sangat berat, sebab modal yang dikeluarkan untuk ongkos produksi akan berkurang jika pembayaran dari hasil penjualan produk/usahanya kurang lancar.

Dengan demikian untuk melaksanakan kegiatan produksi, mereka tidak punya dana sebagai modal/ongkos produksi. Sedangkan hambatan yang berasal dari faktor internal pengurus terjadi, yaitu untuk mengharapkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan program PNPM Mandiri yang dilaksanakan oleh BKM, maka terlebih dahulu dibutuhkan tumbuhnya peran aktif dari seluruh pengurus BKM yang perlu digalakkan. Hal itu memang sudah sewajarnya, karena pengurus memang dipilih oleh warga masyarakat untuk rela menyediakan waktu dan pikirannya guna berkiprah dalam lembaga kemasayarakatan BKM ini. Hambatan yang timbul berkenaan dengan peran setiap anggota Pengurus BKM adalah, bahwa lembaga ini hanya merupakan lembaga non formal atau lebih tepatnya sebagai lembaga sosial kemasayarakatan. Namun karena fungsi utamanya BKM dibentuk yaitu dalam rangka menjalankan Program P2KP sebelumnya dan saat ini PNPM Mandiri yang mengarah pada lembaga menyalur pinjaman dana ke masyarakat. Sehingga dengan

dari laporan mingguan, bulanan, bahkan laporan tahunan, sebagai layaknya kantor Koperasi. Untuk mengharapkan partisipasi pengurusnya, di BKM memerlukan penanganan serius setiap hari melainkan semua pengurus yang melayani para KSM yang harus membayar angsuran bulanannya kepada UPK.

diusahakan untuk membantu jalannya kegiatan program. sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban, misa serta dalam pertemuan/diskusi, dana bergulir di BKM.

Oleh karena itu maka bentuk partisipasi masyarakat Bugul Kidul masuk dalam bentuk partisipasi impleme partisipasi pemanfaatan program. Jadi dengan demikia dicermati lebih lanjut adanya partisipasi masyarakat terse bersifat ikut ikutan, dalam artian bahwa masyarakat hanya m saja program pembangunan yang diluncurkan oleh pihak la hal ini Pemerintah Pusat yang dituangkan dalam Manu PNPM Mandiri. Sedangkan yang berikutnya adalah bahwa m baru mau ikut terlibat apabila program pembangunan ter

partisipasi pemanfaatan program. Jadi dengan memperhatikan lebih lanjut adanya partisipasi masyarakat sebagai sifat ikut ikutan, dalam artian bahwa masyarakat sebagai subjek dalam program pembangunan yang diluncurkan oleh pemerintah ini Pemerintah Pusat yang dituangkan dalam Undang-Undang PM Mandiri. Sedangkan yang berikutnya adalah masyarakat mau ikut terlibat apabila program pembangunan

mendapatkan dukungan yang spontan dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah telah berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

diperuntukkan kepada masyarakat khususnya dalam mena kemiskinan. Program yang demikian itu masih menggunakan pembangunan untuk masyarakat dan bukan program yang pada masyarakat.

Partisipasi masyarakat bukan sebagai faktor ikutan, sebagai faktor utama dalam setiap program pembangunan halnya dalam PNPM Mandiri ini, masyarakat tidak hanya untuk ikut mensukseskan penyelenggaraan program, namun lagi yakni sebagai aktor tingkat lokal. Partisipasi masyarakat Kelurahan Bugul Kidul memang sudah cukup baik, namun baik lagi apabila seluruh komponen masyarakat (tid

Partisipasi masyarakat bukan sebagai faktor ikutan, sebagai faktor utama dalam setiap program pembangunan. Halnya dalam PNPM Mandiri ini, masyarakat tidak hanya untuk ikut mensukseskan penyelenggaraan program, namun lagi yakni sebagai aktor tingkat lokal. Partisipasi masyarakat Kelurahan Bugul Kidul memang sudah cukup baik, namun baik lagi apabila seluruh komponen masyarakat (tidak hanya masyarakat miskin yang dijadikan sasaran) turut bahu menumbuhkan rasa saling peduli terhadap kondisi lingkungannya. Pendek kata bahwa partisipasi masyarakat s tidak hanya dituntut bagi yang berperan sebagai objek, te paling penting justru harus ditujukan bagi yang berpera subsektor pembangunan.

2. Upaya BKM dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Dari hasil penelitian tentang upaya yang telah dilakukan oleh BKM dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program PNPM Mandiri dapat disampaikan kembali sebagai berikut: upaya yang telah dilakukan oleh BKM Kelurahan Bugul Kidul sudah cukup optimal untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program PNPM Mandiri di wilayah Kelurahan Bugul Kidul. Upaya tersebut ditempuh setelah melalui mekanisme proses pembelajaran (learning process).

Walaupun dengan segala keterbatasannya, pengurus BKM telah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Dilandasi oleh prinsip-prinsip dan asas-asas PNPM Mandiri, pengurus berusaha melakukan upaya konkret guna memperoleh dukungan dan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan program PNPM Mandiri. Secara umum upaya-upaya tersebut merupakan suatu keputusan kolektif yang diambil pengurus BKM setelah mengamati dan merasakan adanya kekurangan atau kelemahan dari yang sudah terjadi atau telah berlaku. Sebagai contoh salah satu upaya yaitu menggalakkan sosialisasi PNPM Mandiri. Upaya ini sangat strategis dan fungsional untuk berusaha menggugah rasa kepedulian terhadap program yang sedang di jalankan. Sebab melalui sosialisasi masyarakat akan mempunyai pemahaman yang benar terhadap seluk beluk program/proyek.

Untuk memahami tujuan program sehingga *capacity and institution building* dapat tercapai, maka kemampuan masyarakat kelompok sasaran untuk memperoleh dan memanfaatkan informasi tentang program menjadi sangat penting. Setiap program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pada hakekatnya membutuhkan keterlibatan kelompok sasaran pada program tersebut. Dengan diketahuinya tujuan dan sasaran program oleh masyarakat, maka niscaya partisipasi dan keterlibatan masyarakat tersebut terhadap program yang dilaksanakan akan meningkat.

Meskipun disadari bahwa informasi merupakan penentu keberhasilan suatu program, namun pada kenyataannya penyebaran informasi dalam masyarakat tidak merata. Dengan demikian orang yang dapat mengambil manfaat dari suatu program adalah mereka yang dekat dengan jaringan/saluran informasi. Padahal untuk mendorong partisipasi orang harus merasa bahwa aksi mereka akan membuat perubahan. Ketidakmampuan memperoleh informasi tentang suatu program akan menyebabkan masyarakat tidak mampu memanfaatkan program tersebut, dan pada gilirannya program itu akan mengalami kegagalan. Semua upaya yang telah dilakukan oleh BKM Sejahtera didasarkan atas sesuatu hal/fenomena yang dirasa dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas, peran, dan fungsinya sebagai pelaku pembangunan tingkat lokal.

memalui proses refleksi atau mawas diri seperti yang formal seperti kegiatan audit, melainkan juga bisa melalui proses kaji tindak (*action research*). Dengan demikian, lebih mengerti masalah-masalahnya daripada pada pelayanan. Tanpa melalui proses identifikasi (*assessment*) yang dilakukan dengan menggunakan proses refleksi (*reflective thinking*), kemudian dilanjutkan dengan rencana kerja (*action plan*), untuk kemudian dimonitor serta dievaluasi, maka upaya yang dipilih akan berhasil menyelesaikan masalah.

3. Hambatan BKM dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Penemuan yang berkaitan dengan fokus penelitian hambatan yang dihadapi oleh BKM Sejahtera dalam menumbuhkan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dapat disampaikan sebagai berikut hambatan BKM untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam implementasi PNPM Mandiri dapat digolongkan sangat serius. Hambatan tersebut selain berasal dari faktor yang menghambat usaha-usaha untuk membela orang kecil/masyarakat miskin, juga datang dari faktor kondisi internal masyarakat miskin itu sendiri.

Kendala yang tampak nyata adalah kendala yang berasal dari faktor eksternal BKM yaitu dari pihak KSM sebagai kelompok penerima manfaat program. Faktor eksternal tersebut sangat erat berhubungan dengan unsur karakteristik dari masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, yaitu keterbelakangan, kerentanan, dan ketidak berdayaan menghadapi lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Keterbelakangan pendidikan misalnya, disinyalir merupakan faktor yang cukup signifikan dapat mempengaruhi ketidak mampuan berkarya dan beraktivitas yang menuntut ketrampilan tertentu. Pemberian bantuan yang sifatnya menuntut daya analisis tidak dapat dilaksanakan, sehingga sangat memakan waktu agar mempunyai kemampuan dan ketrampilan yang dikehendaki.

Demikian juga dengan aspek kerentanan yang selalu menghantui para masyarakat utamanya yang berpenghasilan rendah. Aspek ini sangat mempengaruhi ketidak aktifan seseorang dalam suatu program pembangunan seperti PNPM Mandiri ini. Partisipasi mereka sangat tergantung dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi di sekitarnya. Seperti misalnya pada musim tertentu, mereka tidak dapat dituntut untuk meningkatkan partisipasinya, sebab untuk mempertahankan hidupnya saja mereka sangat sulit dan sangat mengharapkan bantuan dari warga sekitarnya yang lebih mampu.

disebabkan oleh sifat dari ketidakberdayaan itu sendiri, dimana mereka melindungi dirinya sendiri mereka tidak mampu apalagi dimobilisasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Banyak dari mereka tidak berprestasi, membuat banyak dan pasrah pada apa yang sedang dan akan datang pada dirinya. Usaha mengentaskan masyarakat miskin dari kemiskinannya secara hakiki sama sulitnya dengan usaha memberdayakannya. Menurut mereka terdapat dua kelompok orang yang akan dihadapi untuk mengentaskan kemiskinan, yaitu kelompok yang bersifat umum dan kendala yang bersifat khusus. Kendala umum adalah kendala yang menghambat usaha-usaha membela orang miskin, sedang kendala yang bersifat khusus yaitu kendala yang terdapat pada diri orang miskin itu sendiri atau orang yang

memberdayakannya. Menurut mereka terdapat dua kelompok yang akan dihadapi untuk mengentas kemiskinan, yaitu kendala bersifat umum dan kendala yang bersifat khusus. Kendala umum adalah kendala yang menghambat usaha-usaha membela orang-orang miskin, sedang kendala yang bersifat khusus yaitu kendala yang terdapat pada diri orang miskin itu sendiri atau orang yang

Kendala yang pertama sebenarnya menyangkut pihak masyarakat miskin, khususnya datang dari pemerintah atau non pemerintah yang peduli terhadap nasib orang miskin. Untuk ini pertanyaan yang dianggap sesuai adalah seberapa besar pemerintah untuk memihak dan membela orang miskin.

orang tersebut". Sedang kendala kedua yakni menyangkut kondisi internal masyarakat miskin itu sendiri.

Yang menjadi kunci untuk mengentaskan kemiskinan sebenarnya berada pada kekuatan dalam diri sendiri, untuk itu diperlukan upaya memberi daya ke atau dengan kata lain memberdayakan masyarakat. Daya tersebut tidak dapat disamakan hanya dengan modal finansial belaka, namun harusnya lebih dari sekedar itu. Masyarakat merupakan upaya untuk menciptakan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya.

daya tersebut tidak dapat disamakan hanya dengan modal finansial belaka, namun harusnya lebih dari sekedar itu. Masyarakat merupakan upaya untuk menciptakan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya.

dapat dibandingkan dari data hasil pengamatan dan wawancara. Berdasarkan hasil pengamatan maka dapat disimpulkan bahwa:

Yang selanjutnya membandingkan data hasil wawancara dengan dokumentasi yang berkaitan. Data hasil wawancara partisipasi masyarakat korelasinya pada dokumentasi pelaksanaan program PNPM Mandiri di bidang lingkungannya. Sebelum pembangunan infrastruktur dan sesudah pembangunan infrastruktur masyarakat menanggapi bahwa beruntung sekali kalau infrastruktur kami dibenahi. Membandingkan data hasil pengamatan atau wawancara dengan data yang dihasilkan dari dokumentasi di lapangan. Pengamatan peneliti memang program yang sudah berjalan memang baik tetapi siapa yang melakukannya. Ternyata sebagian warga pembangunan program dilaksanakan

masyarakat menanggapi bahwa beruntung sekali kalau ini kami dibenahi. Membandingkan data hasil pengamatan atau dengan data yang dihasilkan dari dokumentasi di lapangan. pengamatan peneliti memang program yang sudah memang baik tetapi siapa yang melakukannya. Ternyata sebagian warga pembangunan program dilaksanakan

KESIMPULAN

1. Ada, hanya sebatas perencanaan dan pelaksanaan program PNPM Mandiri.
2. Dinamika proses partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat di kelurahan Bugul Kidul yaitu:
 - a. Peran serta masyarakat penerima manfaat proyek PNPM Mandiri sering terganggu oleh adanya kesibukan aktifitas bekerja.
 - b. KSM sebagai kelompok masyarakat yang tergolong kurang mampu, maka anggota KSM memiliki kelemahan baik fisik maupun mental.
 - c. Banyak anggota KSM pada awalnya yang memperoleh informasi bahwa bantuan kredit PNPM Mandiri tidak perlu dikembalikan, karena dana itu memang untuk orang miskin jadi tidak perlu dikembalikan.
 - d. Proses pembentukan kelompok tersebut terjadi secara *instant*, maka keunggulan dinamika kelompok untuk menggalang sinergi dari potensi yang dimiliki para anggotanya tidak terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Black, James A. dan Champion. Dean J, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 1999.
- BPS Kota Pasuruan. Kecamatan Bugul Kidul dalam Angka 2008. Pasuruan, 2008
- Daniel, Moehar., Darmawati, dan Nieldalina, *PRA Participatory Rural Appraisal Pendekatan Efektif Mendukung Penerapan Penyuluhan Partisipatif dalam Upaya Percepatan Pembangunan Pertanian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Toha Putra, 1989.
- Departemen Pekerjaan Umum, *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan 2008 Bersama Membangun Kemandirian dalam Pengembangan Lingkungan Permukiman yang Berkelanjutan*, Jakarta: Direktorat Jendral Cipta Karya, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Hoselitz, Bert F (Ed), *Panduan Dasar ilmu-Ilmu Sosial Pemer kaya Pendekatan Antar Disiplin dan Bacaan Awal Sebelum Memilih Spesialisasi*, Jakarta: Rajawali Press, 1988.
- Huraerah, Abu, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, Bandung: Humaniora, 2008.
- Ife, Jim dan Frank Tesoreiro, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community Development*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Muller, Johannes, *Perkembangan Masyarakat Lintas-Ilmu*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Mulyono, Dede, *Metodologi Penelitian Ilmiah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Prayitno, Hadi dan M Umar Burhan. *Pembangunan Ekonomi Pedesaan*, Yogyakarta: BPFE, 1987.

